

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT)/MAGANG III**

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA

Jalan A.M Sangaji 50 Cokrodingratan, Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta

Laporan ini disusun sebagai Pertanggungjawaban
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Semester Gasal
Tahun Ajaran 2017/2018



Disusun Oleh:

Nanik Widiana Sari

NIM : 14401241038

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Peserta Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)/Magang III di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta :

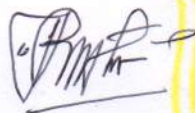
Nama : Nanik Widiana Sari
NIM : 14401241038
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta dari tanggal 18 September – 15 November 2017. Hasil kegiatan tercantum dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, 15 November 2017

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing



Sri Hartini, M.Hum
NIP 19580116 198503 2 001

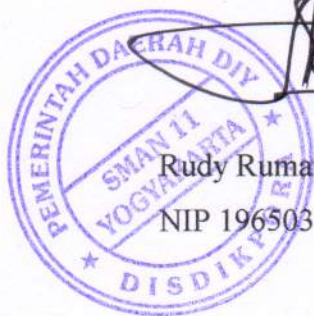


Sulastri, S.Pd
NIP 19720926 200604 2 006

Mengesahkan

Kepala Sekolah
SMA Negeri 11 Yogyakarta

Koordinator PLT
SMA Negeri 11 Yogyakarta



Rudy Rumanto, S.Pd
NIP 19650312 199412 1 003



Dwi Raharjo, S.Pd
NIP 19700301 199201 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang tercantum dalam laporan kegiatan PLT di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta, Jl. AM Sangaji No. 50 Yogyakarta ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam laporan ini berisi deskripsi secara menyeluruh mengenai kegiatan PLT Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di lokasi PLT.

Dalam menyusun laporan ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga saya mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku rektor UNY yang telah memberikan izin dan kesempatan melaksanakan PLT.
2. Ibu Sri Hartini, M.Hum, selaku dosen pembimbing PLT yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terlaksananya program PLT.
3. Bapak Rudy Rumanto, S.Pd., selaku kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta yang telah memberikan izin, sarana dan prasarana serta kesempatan kepada Peserta Didik untuk melaksanakan program PLT.
4. Bapak Dwi Raharjo, S.Pd., selaku koordinator PLT di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta.
5. Ibu Sulastri S.Pd, selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peserta Didik pada saat akan dan setelah mengajar di kelas.
6. Bapak/Ibu guru dan seluruh staf dan karyawan yang telah membantu selama pelaksanaan program PLT.
7. Seluruh Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program PLT.
8. Teman-teman seperjuangan PLT-UNY, PLT-UST, dan PLT-USD yang telah bekerja sama melaksanakan program dengan penuh kekompakan dan kebersamaan.
9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang telah diberikan akan menjadi amal yang baik dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Tak lupa saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama pihak di lokasi PLT, apabila saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama pelaksanaan PLT. Akhir kata saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 15 November 2017
Mahasiswa PLT

Nanik Widiana Sari
14401241038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	1
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT	9
BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL	
A. Persiapan	12
B. Pelaksanaan Program PLT	15
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	22
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	25
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	vii
LAMPIRAN	ix

**PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT/MAGANG III)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA**

Oleh:

Nanik Widiana Sari (NIM 14401241038)

ABSTRAK

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun ke lembaga atau sekolah untuk mendapatkan pengalaman sebagai seorang guru. Sekolah sasaran PLT yang dimaksud yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta (SMAN 11 Yogyakarta) JL. AM Sangaji No. 50 Jetis, Yogyakarta. SMAN 11 Yogyakarta merupakan sekolah dengan nuansa kebangsaan, sekolah hijau dan memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang banyak untuk Peserta Didik. Peserta Didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran. Banyak Peserta Didik yang mengoptimalkan fasilitas-fasilitas dan komunitas yang ada di sekolah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, kegiatan kerohanian juga dilangsungkan dengan baik oleh pihak sekolah, yaitu dengan kegiatan afeksi setiap hari Jum'at.

PLT di SMAN 11 Yogyakarta ini berlangsung mulai tanggal 18 September 2017 – 15 November 2017 dalam pembelajaran mata pelajaran PPKn untuk kelas X IPA 2 dan X IPA 3. Kegiatan PLT dilaksanakan mulai dari Observasi, menyusun administrasi berupa pengitungan hari/jam efektif, program tahunan, program semester, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran dan analisis hasil belajar siswa. Di samping itu kegiatan non-pembelajaran juga dilaksanakan antara lain piket 3S (Senyum, Salam, Sapa), Piket perpustakaan, dan piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta kegiatan administrasi.

Secara umum, pelaksanaan program PLT di SMAN 11 Yogyakarta berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah disusun. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara praktikan dengan pihak-pihak diantaranya adalah dosen pembimbing, guru pembimbing, Peserta Didik, dan teman-teman mahasiswa PLT walaupun terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh praktikan.

Kata kunci : *Praktik Lapangan Terbimbing, SMAN 11 Yogyakarta*

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional untuk menghasilkan tenaga kependidikan. Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal serta masyarakat. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki dunia pendidikan, serta mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang profesional sebagai seorang tenaga kependidikan.

PLT juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan. Kegiatan PLT ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya (*real teaching*). Sebelum pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing, seluruh mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta harus memahami terlebih dahulu situasi, kondisi, dan keadaan sekolah. Pengenalan situasi ini baik berupa kondisi geografis sekolah maupun kondisi fisik sekolah yang melingkupi fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah mampu memberikan kontribusi positif bagi sekolah dalam rangka peningkatan maupun pengembangan program-program sekolah. Oleh karena itu mahasiswa peserta PLT berusaha untuk merancang dan melaksanakan program-program PLT yang sejalan dengan program sekolah sebagai upaya untuk lebih memajukan sekolah diberbagai bidang. Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengukur kesiapan dan kemampuan untuk menjadi *innovator mediator problem solver* dalam menghadapi berbagai permasalahan di sekolah dan di dunia pendidikan pada umumnya. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PLT diharapkan dapat digunakan sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga

kependidikan yang profesional. Melihat latar belakang yang ada, praktik melaksanakan PLT di tempat yang dipilih sebelumnya dari beberapa tempat yang telah ditentukan oleh pihak LPPMP. SMA ini berlokasi di Jl.AM. Sangaji 50, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta.. Sebelum kegiatan PLT dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu secara garis besar yang berhubungan dengan permasalahan dan potensi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal yang diamati antara lain:

- a. Perangkat pembelajaran seperti Silabus, dan RPP yang digunakan sekolah.
- b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.
- c. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar kelas.

A. Analisis Situasi

1. Profil SMAN11 Yogyakarta

a. Identitas Sekolah

Nama Sekolah	: SMAN 11 Yogyakarta
NISN/ NSS	: 301046004059
Status	: Negeri
Status Akreditasi	: Terakreditasi A (96,63)
Pelaksanaan Program SMA	: SK. Dit. Pembinaan, Kemendiknas No: Model SKM – PBKL – PSB 961/C.C4/LK/2010, Penetapan 132 SMA Model SKM – PBKL – PSB
Alamat Sekolah	: Jl. AM. Sangaji no. 50 Yogyakarta
Propinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kab/ Kota	: Yogyakarta
Kecamatan	: Jetis
Kode Pos	: 55233
Telepon	: 0274565898
Fax	: 0274565898
Website	: www.sma11jogja.sch.id
Email	: smanegeri11_yogyakarta@yahoo.com

b. Sejarah Singkat Sekolah

Gedung dibangun pada tahun 1897 dan digunakan sebagai gedung Kweekschool (Sekolah Guru Zaman Belanda). Pada tanggal 3 – 5 Oktober dijadikan sebagai ajang

Kongres Boedi Utomo yang pertama dan menempati ruang makan Kweekschool (Aula Budi Utomo). Tahun 1927 kompleks gedung ini digunakan sebagai sekolah guru untuk masa studi 4 tahun dan 6 tahun (HIK). Selama penjajahan Jepang digunakan untuk SGL dan ditutup pada masa Revolusi Kemerdekaan RI.

Tahun 1946 sekolah dibuka kembali dengan nama SGB dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang berpendidikan 6 tahun pada bulan November 1947, pemerintah membuka Sekolah Guru A (SGA) sehingga kompleks gedung menjadi SGA/ SGB dipimpin oleh bapak Sikun Pribadi. Perkembangan SMAN 11 Yogyakarta

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) 1989 – 1990 | : Jumlah kelas 12 |
| 2) 1991 – 1994 | : Jumlah kelas 14 |
| 3) 1994 – 2008 | : Jumlah kelas 16 |
| 4) 2009 – 2010 | : Jumlah kelas 18 |
| 5) 2010 – 2011 | : Jumlah kelas 20 |
| 6) 2011 – 2012 | : Jumlah kelas 23 |
| 7) 2012 – 2013 | : Jumlah kelas 26 |
| 8) 2013 – 2014 | : Jumlah kelas 27 |
| 9) 2014 – sekarang | : Jumlah kelas 27 |

2. Visi dan Misi SMAN 11 Yogyakarta

Trend perkembangan dunia ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan. Hal itu menuntut adanya paradigma baru dunia pendidikan, yaitu perlunya cara pandang secara holistik. Artinya dunia pendidikan akan menekankan pada penekanan yang menyeluruh dan bersifat global. Paradigma baru di dunia pendidikan ini sekaligus menuntut pengembangan kemampuan peserta didik untuk:

- Mendekati permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner
- Menyeleksi arus informasi yang sedemikian deras untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari
- Menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain secara kreatif
- Meningkatkan kemandirian dalam kehidupan yang semakin kompleks
- Menekankan pembelajaran lebih pada *learning how to learn*, dari pada *learning something*.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan untuk bersaing di era global sangat diperlukan. Mutu pendidikan hanya akan terwujud jika proses pendidikan di

sekolah benar-benar menjadikan peserta didik mampu belajar dan belajar sebanyak mungkin. Mutu pendidikan harus dilihat dari meningkatnya kemampuan belajar peserta didik secara mandiri, bukan dari informasi pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Pengetahuan apa pun yang mereka kuasai adalah hasil belajar yang mereka lakukan sendiri. Selain itu, perbaikan mutu pendidikan itu sesungguhnya terjadi di dalam kelas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dari perkembangan dunia secara global, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik sekolah menengah. Dengan demikian upaya penataan dan pengembangan program pendidikan perlu diperhatikan dengan seksama agar tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan. Penataan dan pengembangan SMA perlu diarahkan pada program-program yang dapat meningkatkan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta efiseinsi manajemen pendidikan.

SMAN 11 Yogyakarta memandang perlu mempersiapkan lulusannya untuk memiliki kemampuan tersebut agar lebih dapat bersaing dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau memperoleh posisi penting di dunia usaha atau di dunia industri di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, SMN11 Yogyakarta perlu melakukan proses perubahan dan pengembangan guru, karyawan dan peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja pada era globalisasi ini, dengan me-reposisi-kan menjadi SMA Kebangsaan yang memiliki program Pendidikan Berbasis Budaya, yang harapannya dapat meningkatkan kualitas akses, mutu dan relevansi serta efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini orientasi pengembangan SMAN 11 Yogyakarta sudah mengarah ke sekolah modern yang unggul dalam kemampuan pelestarian budaya tata boga dan karawitan, unggul dalam penguasaan bahasa Inggris serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung arah pengembangan sekolah tersebut maka dicanangkan Visi dan Misi SMAN11 Yogyakarta, adapun Visi SMAN 11 Yogyakarta yaitu : “Terwujudnya Sekolah Yang Unggul Intelektual, Integritas Santun Berwawasan Kebangsaan dan Bercakrawala Global”.

Visi ini merupakan kristalisasi dan upaya keras SMAN 11 Yogyakarta dalam mencetak dan menghasilakn lulusan berkualitas dari sisi intelektual maupun integritas moral, serta memiliki semangat untuk kebangsaan, sehingga dapat

berkembang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Adapun maknanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah unggul intelektual: sekolah yang insannya tajam pikirannya, cerdas, pandai, tanggap, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, kreatif, inovatif dan logis
- 2) Sekolah unggul integritas santun: sekolah yang insannya mengerti siapa dirinya, masa depannya, berpikiran ke depan, punya rasa percaya diri, berpandangan terbuka, berbudi luhur, taat menjalankan agamanya, sopan santun, memiliki perasaan hati yang bersih, murni dan mendalam.
- 3) Insan berwawasan kebangsaan bercakrawala global: insan yang menyadari cinta bangsa dan tanah air bertekad mempertahankan dan memajukannya sehingga setara dengan bangsa-bangsa lain dan menyadari merupakan bagian dari kehidupan di dunia ini.

Sejalan dengan visi dan indikator visi yang telah dicanangkan dan dengan semangat untuk mengedepankan keunggulan di era global, maka SMAN 11 Yogyakarta memiliki misi sebagai berikut ini:

- a. Menerapkan sistem layanan pendidikan yang bermutu berpedoman pada 8 Standar Nasional Pendidikan
- b. Mengembangkan kemampuan akademik bercakrawala global dengan penerapan dan pengembangan kurikulum lokal, nasional maupun internasional
- c. Mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik secara optimal yang berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan globalisasi
- d. Menciptakan budaya sekolah yang sportif, kreatif, menyenangkan dan santun dengan penuh rasa kekeluargaan
- e. Membangun kerjasama dengan pihak luar sekolah sesuai dengan tuntutan globalisasi

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh SMAN 11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk peserta didik yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia, budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa
- b. Mengoptimalkan potensi dan kreatifitas peserta didik untuk mencapai berbagai keunggulan dan mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional dalam waktu sewindu

- c. Membekali peserta didik agar memiliki kemampuan akademik dan non akademik berwawasan global, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d. Mewujudkan profesionalisme dan etos kerja penyelenggaraan pendidikan
- e. Menjadikan warga sekolah bersikap jujur, kreatif, inovatif dan mandiri serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman

4. Kondisi Fisik Sekolah

Kegiatan PLT di SMAN 11 Yogyakarta dimulai dengan melakukan observasi ke sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah, mencari data dan informasi mengenai kondisi fisik SMAN 11 Yogyakarta. Berikut adalah data hasil observasi yang dilakukan oleh PLT UNY:

a. Ruang Kelas

Ruang kelas di SMAN 11 Yogyakarta terdiri dari 27 ruangan. Dimana masing-masing kelas X, XI, XII memiliki 7 rombel kelas program IPA dan 2 program IPS untuk kelas X dan XI, kemudian 6 rombel kelas program IPA dan 3 Rombel kelas IPS. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kelas

No	Kelas	Jumlah	Keterangan
1	X	9	X IPA 1, X IPA 2, X IPA 3, X IPA 4, X IPA 5, X IPA 6, X IPA 7, X IPS 1, dan X IPS 2.
2	XI	9	XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, XI IPA 5, XI IPA 6, XI IPA 7, XI IPS 1 , dan XI IPS 2.
3	XII	9	XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPA 5, XII IPA 6, XII IPS 1, XII IPS 2 dan XII IPS 3.

b. Ruang Laboratorium

SMAN 11 Yogyakarta memiliki laboratorium Biologi, Fisika, Kimia dan Komputer.

c. Ruang Aula

SMAN 11 Yogyakarta memiliki aula yang bernama Aula Budi Utomo.

d. Ruang Pertemuan

SMAN 11 Yogyakarta memiliki dua ruang pertemuan, yaitu ruang AVA, ruang Garuda dan ruang Commite.

e. Ruang Karawitan

SMAN 11 Yogyakarta memiliki satu ruang untuk karawitan.

f. Ruang Tata Usaha

SMAN 11 Yogyakarta memiliki ruang Tata Usaha yang terletak di bagian depan gedung sekolah.

g. Ruang Kepala Sekolah

Terletak di bagian depan sekolah dan disamping ruang tata usaha, didalamnya terdapat meja dan kursi untuk menerima tamu, dan terdapat tv untuk memantau ruang kelas dengan alat bantu cctv.

h. Ruang Wakil Kepala Sekolah

Ruang Wakil Kepala Sekolah berada di sebelah timur Aula Budi Utomo.

i. Ruang Guru

Ruang Guru berada di sebelah selatan ruang Wakil Kepala Sekolah

j. Ruang Bimbingan Konseling

Ruang Bimbingan Konseling berada di sebelah utara ruang Wakil Kepala Sekolah

k. Ruang Perpustakaan

Perpustakaan SMAN 11 Yogyakarta bernama Perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Perpustakaan ini dikelola dengan sangat baik. Kondisi dari perpustakaan tersebut adalah rapi, bagus dan bersih. Ruangnya sangat luas dan nyaman. Disana terdapat kursi, meja baca, dan tempat lesehan untuk membaca.. Perpustakaan ini pernah menjadi juara perpustakaan terbaik se-DIY tahun 1993. Selain sebagai tempat untuk membaca dan mencari buku, perpustakaan juga berfungsi sebagai kelas non Islam. Perpustakaan tersebut sudah mengelompokkan buku sesuai dengan jenisnya. Berikut adalah pengelompokkan buku di perpustakaan :

- 1) Laporan KKN PLT mahasiswa
- 2) Karya Umum
- 3) Ilmu sosial, politik, ekonomi, hukum dan pendidikan
- 4) Ilmu agama
- 5) Bahasa
- 6) Ilmu murni

- 7) Ilmu terapan
- 8) Kesenian dan olahraga
- 9) Kesusastraan
- 10) Biografi dan sejarah
- 11) Fiksi
- 12) Buku laporan Ilmu pengetahuan praktis
- 13) Ilmu pasti dan IPA
- 14) Ilmu pengetahuan dan masyarakat
- 15) Sastra
- 16) Seni hiburan dan olah raga
- 17) Sejarah, Biografi dan Ilmu bumi
- 18) Ilmu pengetahuan bahasa
- 19) Karya ilmiah
- 20) Majalah
- 21) Komputer

Komputer yang terdapat di perpustakaan sebanyak 10 unit. Komputer-komputer tersebut berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh siswa-siswa untuk mencari informasi. Selain itu juga terdapat LCD dan proyektor untuk memfasilisi kegiatan belajar mengajar di perpustakaan.

l. Koperasi Peserta didik

Koperasi peserta didik terletak diantara kelas XII program IPA

m. Ruang Ekstrakurikuler

Ruang Ekstrakurikuler berada di sebelah utara aula Budi Utomo

n. Ruang OSIS

Ruang Ekstrakurikuler berada di sebelah utara aula Budi Utomo

o. Ruang UKS

UKS berada di sebelah barat ruang BK

p. Kantin

Kantin berada di belakang kelas X IPS, yang terdiri dari 6 kios kantin

q. Ruang Hijau

Ruang Hijau berada di sebelah selatan aula Budi Utomo yang berisi tanaman-tanaman yang dirawat

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT

Program PLT ini merupakan bagian dari mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program mengajar teori dan praktik di kelas dengan bimbingan guru masing-masing mata pelajaran. Selain itu juga berupa kegiatan-kegiatan non-mengajar lainnya yang terdapat di lingkungan sekolah.

Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang aspek-aspek karakteristik komponen pendidikan, iklim, dan norma yang berlaku di sekolah tempat PLT. Aspek yang diobservasi meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku atau keadaan peserta didik, administrasi persekolahan, fasilitas pembelajaran dan pemanfaatannya. Observasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan mahasiswa PLT yang telah diatur oleh pihak sekolah.

Informasi mengenai SMAN 11 Yogyakarta dan unit-unitnya disampaikan secara singkat oleh pihak sekolah pada saat observasi dan juga pada saat penerjunan. Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing dimulai dari tanggal 18 September – 15 November 2017. Kegiatan PLT dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal.

Rancangan kegiatan PLT adalah suatu bentuk hasil perencanaan yang dibuat dengan berdasarkan waktu dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mahasiswa melaksanakan PLT. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu maka kegiatan PLT direncanakan sebagai berikut:

1. Persiapan di kampus

a. Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro dilaksanakan pada semester sebelumnya/semester 6 untuk memberi bekal awal pelaksanaan PLT. Dalam pengajaran mikro mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 12 sampai 14 orang dengan satu orang dosen pembimbing mikro. Setiap mahasiswa mendapat empat kali kesempatan untuk praktik mengajar di laboratorium sementara mahasiswa lainnya berperan sebagai peserta didik dan dosen melihat, mengarahkan dan memberikan bimbingan untuk tampilan yang lebih baik.

Pada saat praktik mengajar di laboratorium, mahasiswa harus mempersiapkan RPP, materi, media dan metode pembelajaran. Hal tersebut dituangkan dalam skenario pembelajaran dengan kurun waktu 20 menit per-

tampilan mengajar. Mahasiswa dapat meminta soft file rekaman video selama tampil mengajar, untuk evaluasi diri.

b. Observasi Sekolah

Observasi sekolah dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi fisik, sosial, dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SMAN11 Yogyakarta sebagai gambaran untuk proses pembelajaran nanti ketika diterjunkan di lapangan. Aspek yang di observasi meliputi perilaku atau keadaan peserta didik, administrasi sekolah, fasilitas sekolah dan pemanfaatannya.

c. Pembekalan PLT

Pembekalan PLT dilaksanakan per fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dilaksanakan di Ruang Ki Hajar yang dibagi menjadi dua shift pembekalan. Pemateri berasal LPPMP yang memberikan bekal-bekal tentang PLT dan pada kesempatan ini mahasiswa dapat menanyakan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam PLT.

2. Persiapan sebelum PLT

Sebelum melaksanakan kegiatan PLT, mahasiswa diharuskan membuat administrasi mengajar. Administrasi mengajar tersebut berupa perangkat pembelajaran, yaitu Prota, Prosem, Silabus, RPP, bahan ajar, media dan metode pembelajaran. Disamping itu juga, mahasiswa mencari referensi buku pelajaran terkait mata pelajaran yang diampu.

3. Kegiatan PLT

a. Praktik mengajar terbimbing

Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar yang dilaksanakan dengan bimbingan guru pengampu mata pelajaran yang bersangkutan.

b. Praktik mengajar mandiri

Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar secara mandiri, mahasiswa harus bisa mengelola kelas, mulai dari membuka pelajaran, menyampaikan materi, memberikan evaluasi, dan menyimpulkan materi.

c. Umpan Balik Guru Pembimbing

Kegiatan ini merupakan bentuk pengarahan dari guru pembimbing pada saat sebelum praktik mengajar dan bentuk evaluasi pada saat setelah selesai mengajar.

d. Penyusunan Laporan

Laporan kegiatan PLT disusun setiap hari dalam bentuk catatan harian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program PLT.

e. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan merencanakan strategi agar lebih baik lagi.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan PLT

Persiapan bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait cara mengajar dan administrasi mengajar agar mahasiswa siap pada saat diterjunkan ke lapangan. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain mengamati kondisi sekolah, kondisi sosial dan fasilitas yang terdapat di sekolah. Disamping itu, kegiatan praktik mengajar mikro juga dilaksanakan di kampus untuk melatih mahasiswa agar lancar dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut persiapan-persipan yang dilaksanakan oleh mahasiswa:

1. Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dilaksanakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 12 sampai 14 orang. Pengajaran ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara langsung di sekolah. Pelaksanaan pengajaran mikro dilakukan dalam kelompok yang beranggotakan 12 orang yang diampu oleh dosen pembimbing mikro, yaitu Sri Hartini, M.Hum dan Drs.Suyato,M.Pd.

Setiap mahasiswa bereksempatan empat-enam kali tampil dalam praktik mengajar, sementara mahasiswa lainnya berperan sebagai peserta didik. Pada saat mengajar mahasiswa diberikan alokasi waktu selama 20 menit dimana harus menampilkan metode dan media pembelajaran. Dan dosen pembimbing memberikan pengarahan beserta evaluasinya kepada mahasiswa. Pengajaran mikro juga merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dan wajib lulus bagi mahasiswa kependidikan agar dapat mengikuti program PLT di sekolah-sekolah.

2. Pembekalan

Pembekalan PLT dilaksanakan per fakultas yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dilaksanakan di Ruang Ki Hajar yang dibagi menjadi dua shift pembekalan. Pemateri berasal LPPMP, yaitu Bapak Anik Ghufro yang memberikan bekal-bekal tentang PLT dan pada kesempatan ini mahasiswa dapat menanyakan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi mahasiswa dalam PLT.

3. Observasi

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PLT, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Observasi tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat merancang program PLT sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Observasi Lingkungan Sekolah

Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah secara detail. Hal-hal yang menjadi aspek observasi lingkungan sekolah adalah lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar mengajar secara umum.

b. Observasi Pembelajaran di Kelas

Observasi pembelajaran di kelas bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi pembelajaran di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa dapat mengetahui gambaran untuk memberikan metode pembelajaran pada saat diterjunkan nanti. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui materi yang akan diberikan, mempelajari situasi kelas, mengetahui tingkat kompleksitas materi bagi peserta didik, mempelajari kondisi peserta didik dan memiliki rencana konkret untuk bahan mengajar. Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut:

1) Perangkat Pembelajaran

- a) Kurikulum untuk kelas X IPA di SMA 11 Yogyakarta menggunakan K13.
- b) RPP yang digunakan dan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di kampus.

2) Proses Pembelajaran

a) Membuka Pelajaran

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik kemudian melakukan presensi peserta didik.

b) Penyajian Materi

Penyajian materi sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat guru. Guru menyampaikan materi dengan jelas.

c) Metode Pembelajaran

yang digunakan adalah ceramah, permainan dan diskusi kelompok.

d) Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

e) Penggunaan Waktu

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 jam pelajaran (2 x 45 menit). Pengalokasian waktu cukup efektif sehingga tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya.

f) Cara memotivasi peserta didik

Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari serta sesekali menyemangati peserta didik dengan lisan. Guru juga memberikan poin plus bagi peserta didik yang aktif selama kegiatan pembelajaran.

g) Menutup Pelajaran

Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan menyampaikan materi untuk tatap muka berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

3) Perilaku peserta didik

a) Perilaku peserta didik di dalam kelas

Peserta didik merespon pelajaran dengan aktif, namun ada beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran.

b) Perilaku peserta didik di luar kelas

Siwa menerapkan 5 S dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

4. Bimbingan DPL Jurusan

Bimbingan DPL Jurusan dapat dijadikan sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan kendala dan permasalahan selama praktik mengajar di sekolah. DPL melaksanakan kunjungan ke sekolah sebanyak tiga kali di SMAN 11 Yogyakarta. Selain bertemu mahasiswa, DPL juga menemui guru pembimbing untuk menanyakan kemajuan dan evaluasi mahasiswa praktikan.

5. Persiapan Mengajar

a. Konsultasi dengan guru pembimbing

Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara mahasiswa PLT dan guru pembimbing. Hal-hal yang dibahas berkaitan dengan sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan beserta perangkat pembelajarannya. Koordinasi ini juga berkaitan dengan evaluasi dari guru pembimbing yang kontinyu dan berkelanjutan selama PLT.

b. Penguasaan materi

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran hendaknya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, mahasiswa harus menguasai materi yang akan diajarkan. Salah satu kegiatan untuk memperoleh penguasaan materi

pembelajaran adalah dengan membaca LKS peserta didik dan buku teks agar materi yang disampaikan sinkron dengan pegangan peserta didik, yaitu LKS.

c. Penyusunan RPP

Penyusunan RPP dilakukan sebelum pertemuan sebelum pembelajaran dilaksanakan. RPP dibuat sebagai rencana pembelajaran yang akan dilangsungkan. Di dalam RPP terdapat materi, metode serta media pembelajaran yang akan diterapkan.

d. Pembuatan media pembelajaran

Media pembelajaran merupakan sarana pembelajaran untuk menyampaikan materi. Media pembelajaran dibuat berdasarkan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media yang telah dibuat berupa Lembar Kerja Peserta didik dan Slide Show menggunakan Power Point.

e. Pembuatan alat evaluasi

Alat evaluasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik. Alat evaluasi dapat berupa latihan soal, penugasan bagi peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, pada setiap akhir bab diadakan evaluasi ulangan harian terkoordinasi.

B. Pelaksanaan Program PLT

Kegiatan PLT dilaksanakan mulai tanggal 18 September – 15 November 2017. Selama melaksanakan program PLT, praktikan melakukan bimbingan dengan guru pembimbing mata pelajaran dan dosen pembimbing lapangan jurusan yang berkaitan dengan program pembelajaran yang direncanakan sebelumnya. Berikut rincian pelaksanaan program PLT di SMAN 11 Yogyakarta:

1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Persiapan yang dilakukan dalam menyusun perangkat pembelajaran, yaitu berkonsultasi dengan guru pembimbing yang berkaitan materi yang akan disampaikan. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan matriks perencanaan yang dialokasikan sebanyak 15 pertemuan dengan 8 RPP. 15 pertemuan yang direncanakan akan menyampaikan dua bab pada semester ganjil mata pelajaran PPKn untuk kelas X IPA. Sebelum disampaikan pada pembelajaran, RPP beserta perangkat di dalamnya dikonsultasikan dengan guru pembimbing, setiap akan memasuki pertemuan di kelas.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan mulai tanggal 22 September 2017 – 15 November 2017. Alokasi waktu sebanyak 2 x 45 menit pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Berikut adalah deskripsi praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa:

a. Pertemuan ke-1

Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Struktur Politik di Indonesia

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.

Hambatan : Muncul perasaan cemas dan gugup karena ini merupakan pertama kalinya dalam praktik mengajar di kelas.

Solusi : Konsultasi dengan guru pembimbing dan menerima kritik dan saran dari teman.

b. Pertemuan Ke-2

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 September 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Struktur Politik Di Indonesia

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang Struktur Politik Di Indonesia

Hambatan : -

Solusi : -

c. Pertemuan Ke-3

Hari/Tanggal : Rabu, 4 oktober 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point suprastruktur dan infrastruktur politik.

Hambatan : -

Solusi : -

d. Pertemuan Ke-4

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.

Hambatan : -

Solusi : -

e. Pertemuan Ke-5

Hari/Tanggal : Rabu, 11 oktober 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.

Metode : Ceramah, diskusi, dan *Matching Game*

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan kertas (karton dan lipat) untuk *games*.

Hambatan : materi terkait kewenangan lembaga-lembaga negara terlalu banyak.

Solusi : menggunakan bagan yang dilengkapi dengan pasal-pasal kemudian peserta didik belajar menggunakan *Matching Game*.

f. Pertemuan Ke-6

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 oktober 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Metode : Ceramah, diskusi, dan *Matching Game*.

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, kertas (karton dan lipat), dan power point tentang lembaga-lembaga negara.

Hambatan : materi terkait kewenangan lembaga-lembaga negara terlalu banyak.

Solusi : menggunakan bagan yang dilengkapi dengan pasal-pasal kemudian peserta didik belajar melalui *Matching Game*.

g. Pertemuan Ke-7

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : *Good Governance* dan partisipasi politik

Metode : Ceramah, diskusi, dan video

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan video tentang *good governance* dan partisipasi politik.

Hambatan : -

Solusi : -

h. Pertemuan Ke-8

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : *Good Governance* dan partisipasi politik

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, power point tentang lembaga-lembaga negara, dan video tentang *good governance* dan partisipasi politik.

Hambatan : -

Solusi : -

i. Pertemuan Ke-9

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Penilaian dan evaluasi (UH BAB 3)

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.

Hambatan : banyak siswa yang minta di *review* materi BAB 3

Solusi :Me-review kembali materi BAB 3, sebelum ulangan dilaksanakan.

j. Pertemuan Ke-10

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Penilaian dan evaluasi (UH BAB 3)

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.

Hambatan : ada 1 peserta didik yang ijin, sehingga tidak bisa bersamaan melakukan ulangan

Solusi : mengadakan ulangan susulan bagi peserta didik yang ijin.

k. Pertemuan Ke-11

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Otonomi daerah dan desentralisasi

Metode : Ceramah dan tugas kelompok menggunakan model pembelajaran *jigsaw*.

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, kertas manila, dan power point tentang otonomi daerah dan desentralisasi

Hambatan : -

Solusi : -

l. Pertemuan ke-12

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 November 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Otonomi daerah dan desentralisasi

Metode : Ceramah dan tugas kelompok menggunakan model pembelajaran *jigsaw*.

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, kertas manila, dan power point tentang otonomi daerah dan desentralisasi

Hambatan : proyektor tidak bisa digunakan

Solusi : menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membaca buku paket dan literasi lain yang berkaitan dengan materi Otonomi daerah dan desentralisasi.

m. Pertemuan ke-13

Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2017

Kelas : X IPA 2

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah

Metode : Ceramah, diskusi, games lempar dadu *educative*

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, balok dadu, dan power point tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.

Hambatan : -

Solusi : -

n. Pertemuan ke-14

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 November 2017

Kelas : X IPA 3

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah

Metode : Ceramah, diskusi, games lempar dadu *educativ*.

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, balok dadu, dan power point tentang lembaga-lembaga negara.

Hambatan : proyektor tidak bisa nyala

Solusi : menggunakan metode ceramah dan diskusi

o. Pertemuan ke-15

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2017

Waktu : 12.30-14.00 WIB

Materi : Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah.

Metode : Ceramah dan diskusi

Media : Lembar kerja siswa , Laptop, LCD dan proyektor, *White Board*, spidol, dan power point tentang Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah.

Hambatan : -

Solusi : -.

Adapun praktik mengajar yang dilaksanakan secara insidental dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Praktik Pembelajaran Insidental

No	Hari, Tanggal	Narasi Proses Pembelajaran	Kelas
1.	Senin, 9 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang Kode etik jurnalistik	XII IPA 2, XII IPA 5
2.	Kamis, 12 Oktober 2017	Presentasi kelompok materi tentang kebebasan pers	XII IPA 4
3.	Kamis, 19 Oktober 2017	Presentasi kelompok materi tentang kebebasan pers	XII IPA 4
4.	Jumat, 20 Oktober 2017	Siswa presentasi mengenai kode etik jurnalistik, guru mendampingi dan menjelaskan setelah selesai presentasi	XII IPA 3
5.	Sabtu, 21 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang dampak kode etik jurnalistik	XII IPA 6, XII IPS 1
6.	Selasa, 31 Oktober 2017	Menyampaikan materi tentang penyalahgunaan dan dampak pers	XII IPS 3, XII IPA 1
7.	Sabtu, 11 November 2017	Mengerjakan ulangan harian 2 lembar kerja siswa (LKS)	XII IPA 6, XII IPS 1

3. Umpan Balik Pembimbing

Guru pembimbing senantiasa memberikan masukan, kritik dan saran agar penampilan mahasiswa yang sedang praktik dapat semakin baik. Misalnya, mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan media Power Point untuk mempermudah penyampaian materi. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk tidak terburu-buru dalam menyampaikan materi. Yang diutamakan adalah bagaimana membuat peserta didik paham betul terkait materi yang disampaikan.

4. Kegiatan Non Pembelajaran

Kegiatan non pembelajaran yang diikuti mahasiswa selama PLT adalah sebagai berikut:

- a. Senyum, Salam, Sapa Pagi (3S)

Senyum, salam, sapa pagi merupakan bentuk kegiatan di pagi hari untuk menyambut peserta didik-siswi yang datang ke sekolah dengan salaman.

b. **Piket Harian KBM**

Piket harian merupakan rutinitas yang terjadwal untuk menjalankan pelayanan administrasi harian, berupa keliling untuk presensi guru mengajar ke seluruh kelas, melayani tamu dari luar, dan memberikan izin bagi peserta didik yang meninggalkan pelajaran.

c. **Upacara**

Upacara dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga pada setiap bulannya. dan upacara yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda, dan hari pahlawan.

d. **Afeksi setiap Jum'at**

Kegiatan afeksi pada hari Jum'at dilaksanakan dengan tadarus bagi yang beragama Islam dan pembacaan doa bagi yang non-Islam. Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 pagi sampai jam 07.15.

e. **Piket perpustakaan**

Kegiatan piket perpustakaan dilaksanakan oleh mahasiswa PLT UNY secara terjadwal untuk menjaga/ ikut serta dalam membantu jaga perpustakaan.

5. Penyusunan Laporan

Tindak lanjut dari program PLT adalah penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan PLT yang telah dilaksanakan. Laporan berisi rincian kegiatan yang dilaksanakan selama PLT. Laporan ini disusun secara individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PLT sekolah, kepala sekolah dan dosen pembimbing lapangan jurusan.

6. Penarikan

Penarikan mahasiswa PLT dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 oleh pihak UNY yang diwakilkan kepada dosen pembimbing lapangan. Penarikan dihadiri oleh kepala sekolah, koordinator PLT sekolah, guru pembimbing mata pelajaran dan mahasiswa PLT. Penarikan ditandai dengan penyerahan kenang-kenangan sebagai tanda terimakasih kepada sekolah.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Pembelajaran dan Refleksi

Pelaksanaan program PLT dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Perencanaan program dapat terlaksana dengan cukup baik. Praktikan dapat melaksanakan 15 (lima belas) tatap muka dengan tujuh RPP yang dilaksanakan dikelas X IPA 2 sebanyak 8 kali tatap muka dan di kelas X IPA 3 sebanyak 7 kali tatap muka. Selain itu ada 11

(sebelas) pembelajaran yang bersifat insidental. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKn juga tergolong aktif yang ditunjukkan dengan keaktifan dalam bertanya, diskusi kelompok dan dalam mengerjakan tugas. Kemudian untuk hasil belajar peserta didik juga tergolong tuntas secara klasikalnya. Namun secara individualnya terdapat beberapa peserta didik yang harus mengikuti program remedi.

Berdasarkan kesan pesan dan kritik saran yang disampaikan peserta didik kepada mahasiswa praktikan, pembelajaran yang diberikan mahasiswa praktikan sudah baik, asyik, dan menyenangkan karena dapat memberikan metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Program yang dilaksanakan tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, praktikan berupaya untuk melakukan analisis hasil dan refleksi sebagai bahan untuk perbaikan dimasa mendatang. Analisis yang dilaksanakan antara lain:

1. Analisis Hasil Pelaksanaan

Program yang telah disusun dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Partisipasi dari peserta didik pun aktif dan responsif. Begitupun juga dengan dosen pembimbing lapangan serta guru pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan evaluasi yang membangun untuk dapat mengajar dengan optimal.

a. Faktor Pendukung

1) Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen pembimbing memberikan bimbingan, pengarahan beserta evaluasi kepada mahasiswa demi terlaksananya program PLT.

2) Guru Pembimbing

Guru pembimbing memberikan kontribusi terhadap keberhasilan praktikan dalam memberikan pembelajaran di kelas. Guru pembimbing senantiasa memberikan arahan dan evaluasi terhadap praktikan dalam mengajar.

3) Peserta didik

Peserta didik-siswi SMAN 11 Yogyakarta merupakan aspek penting dalam melaksanakan program PLT. Kerjasama yang baik antara peserta didik dengan praktikan dapat mendukung suksesnya pembelajaran.

4) Sekolah

Sekolah merupakan pihak yang paling penting dalam melaksanakan program PLT. Fasilitas yang terdapat di sekolah dapat digunakan peserta didik untuk berkreasi terhadap materi yang disampaikan

b. Faktor penghambat

Pelaksanaan program PLT tidak dipungkiri terdapat berbagai macam hambatan yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dalam menghadapinya, praktikan senantiasa mencari solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Berikut hambatan-hambatan yang dialami praktikan dalam proses pembelajaran :

- 1) Kesulitan menghafal nama peserta didik
 - a) Deskripsi : praktikan mengalami kesulitan dalam menghafal nama peserta didik yang cukup banyak dalam waktu dekat
 - b) Solusi : praktikan selalu melakukan presensi setiap kelas akan dimulai
- 2) Peserta didik yang ramai sendiri
 - a) Deskripsi : pada jam-jam tertentu, misalnya jam terakhir peserta didik sudah tidak antusias mengikuti pembelajaran dan ramai sendiri.
 - b) Solusi : praktikan memberika aktivitas berupa penugasan untuk peserta didik agar fokus ke pembelajaran.
- 3) Kabel Proyektor Rusak
 - a) Deskripsi : pada kelas X IPA 3 beberapa kali proyektor tidak dapat digunakan dengan baik
 - b) Solusi : menyampaikan materi dengan ceramah dengan memanfaatkan papan tulis, kemudian memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membaca buku paket dan literasi lain yang berkaitan dengan materi Otonomi daerah dan desentralisasi.

2. Refleksi

Kegiatan PLT mengajarkan kepada mahasiswa bahwa menjadi seorang guru tidak hanya bisa menguasai materi tetapi juga harus bisa menguasai dan mengkondisikan kelas dengan baik. Seorang guru juga harus cepat, tanggap, dan cekatan dalam menangani kelas. Guru harus memahami kondisi peserta didik yang beragam dan tidak bisa disamakan. Perlakuan-perlakuan seorang guru juga harus adil dan objektif. Selain itu, yang paling utama adalah seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai moral untuk bekal generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan PLT Universitas Negeri Yogyakarta 2017 dilaksanakan di SMAN 11 Yogyakarta dimulai sejak tanggal 18 September 2017 – 15 November 2017 yang berlokasi di SMAN11 Yogyakarta. Kegiatan PLT yang dilaksanakan oleh praktikan meliputi observasi lingkungan sekolah, observasi suasana pembelajaran dan pelaksanaan praktik mengajar di kelas, menyusun administrasi dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah.

Observasi pembelajaran bertujuan untuk mengamati guru pembimbing dan peserta didik di dalam kelas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Observasi kondisi sekolah bertujuan untuk mengamati sarana dan prasarana sekolah sebagai faktor penunjang kegiatan pembelajaran. Praktik mengajar yang dilakukan praktikan sebanyak 15 x tatap muka selama 8 minggu. Selama PLT, Praktikan mengajar kelas X IPA 2 dan X IPA 3. Penyusunan administrasi yang dilakukan oleh Praktikan berupa pengitungan hari/jam efektif, program tahunan, program semester, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan analisis hasil belajar siswa. Selama PLT kegiatan yang diikuti oleh Praktikan antara lain, Upacara dalam memperingati hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda, dan hari pahlawan, Piket Senyum, Salam, Sapa (3S), Piket Perpustakaan dan Piket KBM.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh praktikan, seperti kesulitan menghafal nama peserta didik, peserta didik yang ramai sendiri dan kabel proyektor rusak ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Solusi dalam mengatasi kesulitan menghafal nama peserta didik, praktikan selalu melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai. Ketika peserta didik ramai sendiri, praktikan memberikan aktivitas berupa penugasan kepada peserta didik agar fokus ke pembelajaran. Sedangkan dalam proses pembelajaran tiba-tiba proyektor mati, praktikan memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membaca buku paket dan literasi lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PLT, maka praktikan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah
 - a. Meningkatkan kontrol peserta didik secara keseluruhan, khususnya terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik.
 - b. Lebih menggali potensi peserta didik, baik *hard skill* maupun *soft skill*
 - c. Perlunya menertibkan administrasi terkhusus administrasi piket harian
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah tempat mahasiswa Praktik Lapangan Terbimbing (PLT)
 - b. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Universitas dengan Sekolah mengenai berbagai mekanisme yang berhubungan dengan kegiatan PLT, sehingga dapat saling memahami kepentingan masing-masing antara kedua belah pihak.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Membina hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan mahasiswa
 - b. Mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang yang sesuai dengan kurikulum 2013
 - c. Lebih memperhatikan kondisi semangat peserta didik dalam pembelajaran di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Kepegawaian SMA N 11 Yogyakarta.

TIM PLT/Magang III UNY. 2017. *Pedoman Pengajaran Mikro/Magang 11*.

Yogyakarta : UNY.

TIM Pembekalan PLT. 2017. *Materi Pembekalan PLT/Magang III Tahun 2017*.

Yogyakarta : UNY.

LAMPIRAN



MATRIKS PROGRAM KERJA PLT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NOMOR LOKASI :
NAMA LOKASI : SMAN 11 YOGYAKARTA
ALAMAT LOKASI : JL. AM. SANGAJI NO. 50, YOGYAKARTA

NAMA : NANIK WIDIANA SARI
NIM : 14401241038
PROGDI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

No	Program/Kegiatan PPL	Jumlah Jam per Minggu										Jml Jam			
		OBS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X		
1	Pembuatan Program PLT														
	a. observasi	7	2												9
	b. Menyusun matrik program PLT	8													8
2	Administrasi Pembelajaran/ Guru														0
	a. Buku induk, Buku leger		2												2
	b. silabus, prota, prosem		2												2
	c. Membuat kisi-kisi soal ulangan harian						2								2
	d. Membuat soal ulangan harian						2								2
	e. Analisis butir soal						2								2
															0
3	Pembelajaran Kokurikuer (Kegiatan Mengajar Terbimbing)														0
	a. persiapan														0
	1) Konsultasi				1	1	2	2	1	1	1				9
	2) Mengumpulkan Materi		1		3	2	4	4	2	2	2				20
	3) Membuat RPP				4	2	4	4	2	2	2				20
	4) Menyiapkan/ membuat media				1	2	4	4	2	2	2				17
	5) Menyusun materi/ Lab sheet				3	1	2	2	1	1	1				11
															0
	b. Mengajar Mandiri dan Terbimbing														0
	1) Praktik mengajar di kelas		4		4	4	4		4	4	2				26
	2) Pelaksanaan ulangan								4						4
	3) koreksi hasil ulangan								4						4
	4) koreksi remedial dan pengayaan									2					2
															0
4	Kegiatan Ekstrakurikuler (Kegiatan non mengajar)														0
	a. Pendampingan Sabtu Bersih				1										1
	b. Pendampingan belajar siswa		4			6	7		4	4					25
															0
															0
5	Kegiatan Sekolah														0
	a. Piket 3S		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
	b. Piket KBM		3	5	5	8	3	5	5	10					44
	c. Piket Perpustakaan			7	7	5	5	7	7	7	7				52
	d. Pendampingan Afeksi		1	1	1	1	1	1	1	1					8
	e. Penyampulan Buku Perpus		3												3
	f. Pengepakan lembar jawab PTS		3												3
	g. Pengecekan Ruang kelas untuk PTS		2												2
	h. Pembagian Administrasi PTS		4												4
	i. Pengawasan PTS				9										9
	j. Inventaris buku perpus		2	4											6
	k. Input data sekolah			4											4
	l. Upacara			3											3
	m. Cap kalender akademik			2	2										4
															0
6	pembuatan Laporan PLT								3		15				18
															0
	Jumlah Jam	15	34	27	42	33	43	38	35	35	33	0		335	

Yogyakarta, 18 September 2017


Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah

Dosen Pembimbing

Mahasiswa PLT




Sri Hartini, M.Hum
NIP. 19580116 198503 2 001


Nanik Widiana Sari
NIM. 14401241038



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

CATATAN HARIAN PLT

TAHUN : 2017

NAMA MAHASISWA : NANIK WIDIANA SARI
NO. MAHASISWA : 14401241038
FAK/JUR/PR.STUDI :

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

No.	Hari, tanggal	Pukul	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/ Kuantitatif	Keterangan/ Paraf DPL
1.	Kamis/02-3-2017	09.00 - 13.00	observasi	<u>Kualitatif</u> : kegiatan observasi untuk yang pertama dilakukan dengan tujuan mahasiswa PLT mengenal lingkungan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Kegiatan ini diawali dengan berkeliling lingkungan sekolah dan berkenalan dengan bapak/ibu Guru SMA N 11 Yogyakarta <u>Kuantitatif</u> : diikuti oleh 19 anggota PLT SMA N 11 Yogyakarta.	

2.	Jumat/03-03-2017	08.00 – 12.00	observasi	<p><u>Kualitatif</u> ; kegiatan observasi yang kedua kali ini dilakukan dengan berkenalan kepada guru pamong. Selain itu seluruh anggota juga berkeliling untuk melihat lingkungan dan keadaan di SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><u>Kuantitatif</u> : kegiatan observasi ke dua ini diikuti oleh 19 anggota kelompok PLT SMA N 11 Yogyakarta.</p>	
3.	Kamis/14-9-2017	11.00-15.00	Penyusunan Matrik Program Kerja PLT	<p><u>Hasil Kualitatif</u> : tersusunnya program kerja Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) selama dua (2) bulan di SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><u>Hasil Kuantitatif</u> : kegiatan ini dihadiri oleh 19 mahasiswa PLT.</p>	
4.	Jumat/15-9-2017	09.00-12.00	Penyusunan Matrik Program Kerja PLT	<p><u>Hasil Kualitatif</u> : tersusunnya program kerja Praktik Program Kerja (PLT) selama dua (2) bulan di SMA N 11 Yogyakarta.</p> <p><u>Hasil Kuantitatif</u> : kegiatan ini dihadiri oleh 19 mahasiswa PLT.</p>	

5.	Senin/18- 9- 2017	07.00 – 09.00	Inventaris Buku Perpustakaan	Kegiatan inventaris buku perpustakaan dilaksanakan di perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta. Kegiatan ini menghasilkan terinventarisnya 150 buku mata pelajaran pendidikan agama islam	
		09.00 – 11.00	Penyerahan PPL	<p><u>Hasil Kualitatif</u> : diterima oleh Kepala Sekolah dan Guru serta Staf.</p> <p><u>Hasil Kuantitatif</u> : dihadiri oleh mahasiswa : 19 orang, DPL : 1 orang, guru dan staf : 4 orang.</p>	
		11.00 – 15.00	Administrasi pembelajaran	Kegiatan administrasi pembelajaran dilaksanakan melalui koordinasi dengan guru pamong (ibu sulastris S.Pd) terkait buku induk, buku leger dan silabus. Prota serta prosem. Hasil kuantitatif dari administrasi pembelajaran yaitu penggunaan 1 buku induk dan 1 buku leger	
6.	Selasa/19-09-2017	07.00 – 09.	Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Kegiatan pembuatan RPP ini dilaksanakan oleh 2 orang di Ruang Garuda SMA N 11 Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1RPP KD 3.3 (Kewenangan	

				<p>lembaga-lembaga negara) Indikator 3.3.1 (suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia). RPP ini kemudian akan di konsultasikan kepada ibu guru pamong.</p>	
		09.00 – 10.00	Konsultasi/Bimbingan Guru Pamong	<p>Kegiatan konsultasi/bimbingan guru pamong dilakukan oleh 1 guru pamog dan 2 mahasiswa bersangkutan. Kegiatan ini menghasilkan terkonsultasinya RPP dalam persiapan mengajar.</p>	
		10.00 – 11.00	Persiapan PTS (Penilaian Tengah Semester)	<p>Kegiatan ini dilakukan oleh 19 mahasiswa PLT UNY di Ruang Garuda SMA N 11 Yogyakarta. Kegiatan ini meliputi persiapan lembar jawab siswa dalam penilaian tengah semester 1. Sebanyak ± 865 lembar jawab siap untuk didistribusikan di PTS yang akan dilaksanakan tanggal 25 september 2017.</p>	
		11.00-14.00	Penyampulan Buku Perpustakaan	<p>Kegiatan ini dilakukan oleh 5 mahasiswa PLT UNY. Hasil dari kegiatan ini sebanyak 235 buku pendidikan agama islam berhasil di sampul menggunakan plastik.</p>	

7.	Rabu, 20-09-2017	06.15-07.15	Piket 3S	<p>Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, guna menyambut siswa dengan senyum, kemudian menyalami dan menyapa. Piket 3S dilakukan oleh mahasiswa PLT dan guru SMA N 11 Yogyakarta (mahasiswa UNY 3orang, dan bapak ibu guru 5 orang).</p>	
		08.00-11.00	Pengepakan lembar jawab PTS	<p>Kegiatan ini dilakukan oleh 19 mahasiswa PLT UNY guna menyiapkan PTS SMA N11 Yogyakarta, yang menghasilkan ±8000 lembar jawab.</p>	
		11.00-15.00	Pembagian administrasi PTS	<p>Dilakukannya koordinasi mahasiswa PLT dengan guru serta karyawan terkait pelaksanaan PTS. Kegiatan ini diikuti oleh 19 mahasiswa PLT UNY yang menghasilkan tersusunnya jadwal jaga dan ruangan yang digunakan.</p>	
8.	Jumat, 22-09-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	<p>Kegiatan pendampingan afeksi merupakan program spiritual /religius di SMA N11 Yogyakarta, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan dan 32 siswa kelas XII IPA 2</p>	

		07.15-08.00	Penyampulan buku perpustakaan	Dilaksanakan oleh 7 mahasiswa PLT UNY di perpustakaan SMA, yang menghasilkan buku keluaran k13 pendidikan kewarganegaraan sebanyak 10 berhasil diberi sampul.	
		08.00-09.30	Observasi KBM di ruang kelas.	Kegiatan ini dilakukan oleh 2 mahasiswa yang bersangkutan, 1 buku guru mata pelajaran PPKn dan 32 siswa dikelas XII IPA 3. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati jalannya KBM.	
		09.00-12.15	Piket KBM	Kegiatan piket KBM dilakukan oleh 3 mahasiswa PLT UNY dan beberapa mahasiswa PLT UST dan sanata dharma. Dalam kegiatan ini mahasiswa bersangkutan menjaga meja resepsionis guna menggantikan peran guru.	
9.	Sabtu, 23-09-2017	07.15-08.45	Mengumpulkan/menyiapkan materi pengajaran	Dilakukan oleh 2 mahasiswa untk mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa kelas XII IPA 6 dan IPS 1.	
		08.45-10.30	Praktik mengajar di kelas XII IPA 6	Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan oleh 2 mahasiswa di kelas XII IPA 6 dengan jumlah siswa 32 siswa. Dengan	

		10.30-12.00	Praktik mengajar dikelas	materi pembelajaran yaitu perbandingan sistem pemerintahan dengan mesia presentasi. Setelah presentasi dilanjutkan dengan pemutaran film dokumner/ Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan oleh 2 mahasiswa, dikelas XII IPA 1 dengan jumlah 32 siswa, materi yang disampaikan yaitu mengulang materi yang telah diajarkan.	
		12.00-14.00	Pengecekan/perispa ruang untuk PTS.	Dilaksanakan oleh mahasiswa PLT UNY yaitu 19 orang didampingi guru untuk mengecek ruang PTS serta menempel nomor pada meja PTS (Siswa).	
10.	Senin, 25-9-2017	10.00-14.00	Input data sekolah	Kegiatan input data sekolah dilaksanakan oleh 3 mahasiswa dan 2 guru di laboratorium komputer, hasil dari kegiatan ini yaitu ter-input data guru sebanyak 8 data guru yang berhasil di input untuk keperluan administrasi sekolah.	
11.	Selasa, 26-9-2017	08.00-12.00	Inventaris buku perpustakaan	Kegiatan ini dilaksanakan di perpustakaan, menghasilkan 230 buku berhasil di inventaris oleh 4 mahasiswa PLT.	
12.	Rabu, 27-9-2017	06.15-07.15	Piket 3 S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA	

				N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 6 orang bapak/ibu gurur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	
13.	Kamis, 28-9-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
14.	Jumat, 29-9-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal.	
		07.15-12.15	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 4 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas,kemudia keliling ke seluruh	

				kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
15.	Sabtu, 30-9-2017	10.00-13.00	Cap kalender akademik	Kegiatan di laksanakan di ruang piket KBM, kegiatan ini menghasilkan ±800 kalender berhasil di cap oleh 3 mahasiswa PLT.	
16.	Minggu, 1-10-2017	06.00-09.00	Upacara peringatan hari kesaktian pancasila	Kegiatan ini dilaksanakan di halaman SMA N 11 Yogyakarta dalam rangka memperingati hari kesaktian pancasila. Upacara berjalan dengan lancar dan nikmat. Peserta upacara terdiri dari bapak/ibu guru dan karyawan. Siswa-siswi SMA (± 865 Siswa). Serta mahasiswa PLT dari UNY, UST, USD sebanyak ± 50 orang.	
17.	Senin, 2-10-2017	07.30-11.30	Pengawasan PTS	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPS. Guna menjalankan tugas dari sekolah yaitu melakukan pengawasan terhadap sisw dalam melakukan PTS. Siswa secara tertib mengikuti PTS. Sejumlah 30 siswa yang diawas oleh 2 orang pengawas untuk mata pelajaran matematika dan bahasa jawa peminatan.	

		11.30-15.30	Pengumpulan materi (bahan ajar) dan pembuatan RPP	Kegiatan ini dilaksanakan di perpustakaan, hasil yang dicapai yaitu terkumpulnya materi pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar terkait suprastruktur dan infrastruktur politik. Kegiatan ini dilakukan oleh 2 mahasiswa bersangkutan. Kemudian, dalam kegiatan pembuatan RPP masih perlu penyempurnaan dalam artian belum selesai.	
18.	Selasa, 03-10-2017	06.30-07.30	Persiapan pengawasan PTS	Kegiatan ini dilaksanakan di ruang AVA oleh bapak ibu guru dan mahasiswa PLT yang bersangkutan. Hasil dari kegiatan ini yaitu soal dan lembar jawab PTS siap dibagikan kepada siswa peserta PTS. Sejumlah \pm 865 soal dan lembar jawab siap di distribusikan untuk PTS.	
		07.30-11.30	Pengawasan PTS	Dilaksanakan di kelas X IPA 5. PTS yang mahasiswa awasi adalah untuk mapel PKN dan Biologi oleh 1 mahasiswa PLT dan 1 guru dengan jumlah siswa 30 siswa berjalan dengan lancar dan kondusif.	
		11.30-13.30	Membuat/menyelesaikan	Terselesainya 1 RPP untuk 2 jam pelajaran dengan	

		13.30-14.30	RPP Konsultasi RPP dan persiapan mengajar	kompetensi dasar yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa bersangkutan. Berkonsultasi dengan guru pamong terkait RPP. Hasil dari kegiatan ini adalah RPP disetujui oleh guru pamong, dan memperoleh sedikit masukan.	
		14.30-15.30	Membuat/menyiapkan media	Kegiatan Membuat/menyiapkan media dilaksanakan di SMA, oleh 2 mahasiswa bersangkutan yang menghasilkan 35 lembar susunan soal untuk diskusi sebagai media.	
19.	Rabu, 04-10-2017	06.15-07.15	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 5 orang bapak/ibu gurur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	
		07.30-09.30	Cap kalender akademik	Dilaksanakan diruang piket KBM, sebanyak ± 900 lembar	

		09.30-12.30	Menyusun materi/lab sheet	<p>kalender telah selesai diberi cap.</p> <p>Kegiatan menyusun materi dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kegiatan mengajar agar mudah tersampaikan. Dalam kegiatan ini telah berhasil menyusun materi dalam bentuk PPT sebanyak 12 sheet.</p>	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	<p>Praktik mengajar di kelas dilaksanakan di kelas, materi berhasil disampaikan kepada siswa yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. KBM dilaksanakan di kelas X IPA 2 dengan jumlah siswa hadir 30 siswa.</p>	
20.	Kamis, 05-10-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	<p>Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.</p>	
21.	Jumat, 06-10-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	<p>Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an,</p>	

		07.15-12.15	Piket KBM	<p>kemudian pengedaran kotak amal.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.</p>	
22.	Sabtu, 07-10-2017	11.00-12.00	Persiapan materi “praktik mengajar terbimbing”	Dilaksanakan di base camp PLT UNY oleh mahasiswa bersangkutan untuk mencari referensi materi yang akan diajarkan.	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas X IPA 3	Praktik mengajar oleh 2 mahasiswa dan 1 guru pamong di hadiri oleh 30 siswa. Materi yang di ajarkan yaitu mengenai suprastruktur dan infrastruktur, siswa aktif mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media PPT Kemudian dilanjutkan dengan tugas/diskusi kelompok.	
23.	Senin, 9-10-2017	06.15-07.15	Persiapan mengajar	Kegiatan dilakukan oleh 2 mahasiswa di perpustakaan	

		08.00-09.30	(mengumpulkan materi) Mengajar di kelas XII IPA 2	dengan mencari dan menghasilkan materi yang akan diajarkan yaitu terkait kode etik jurnalistik. Kegiatan mengajar di kelas XII IPA 2 oleh 2 mahasiswa dan siswa hadir 32 siswa. Pembelajaran diawali dengan presentasi mengenai pengertian, fungsi, peran, dan perkembangan pers di indonesia lalu guru menjelaskan materi yang belum dipahami.	
		09.45-11.15	Mengajar di kelas XII IPA 5	Kegiatan mengajar di kelas XII IPA 5 oleh 2 mahasiswa PLT. Siswa yang hadir 32 siswa (masuk semua). Pembelajaran diisi dengan presentasi kelompok yaitu kelompok 7 mengenai pengertian, peranan, fungsi dan perkembangan pers di indonesia, terdapat 3 siswa yang bertanya diskusi berjalan dengan lancar.	
24.	Selasa, 10-10-2017	07.00-09.00	Menyusun RPP	Kegiatan menyusun RPP dilaksanakan di ruang perpustakaan, oleh mahasiswa yang bersangkutan yang menghasilkan 1 rencana pelaksanaan pembelajaran (30 lembar). Kegiatan ini menghasilkan terkonsultasinya RPP	

		11.00-16.00	Mengumpulkan materi, membuat media dan membuat sheet PPT	<p>untuk 2 jam pelajaran dan mendapatkan beberapa masukan yang diberikan oleh guru pamong.</p> <p>Di laksanakan di basecamp PLT yang bertujuan untuk persiapan mengajar. Hasil kualitatifnya yaitu tersusunnya 1 PPT dengan 13 sheet PPT. 10 Lembar rangkuman materi dan membuat media berupa kertas untuk tugas kelompok.</p>	
25.	Rabu, 11-10-2017	06.15-07.15	Piket 3S	<p>Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 7 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 3 orang bapak/ibu gurur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.</p>	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	<p>Kegiatan praktik mengajar di kelas X IPA 2, dengan diamati oleh guru pamong. Materi yang diajarkan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 19045, Siswa hadir semua (30 siswa), siswa aktif mengikuti mata pelajaran PKn, kemudian dilannutkan</p>	

				dengan diskusi kelompok.	
26.	Kamis, 12-10-2017	08.45-10.30	Mengajar di kelas XII IPA 4	Kegiatan praktik mengajar di kelas XII IPA 4 oleh 2 mahasiswa PLT, Siswa hadir semua (32 siswa), materi pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi kelompok mengenai pers.	
		10.30-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
27.	Jumat, 13-10-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal.	
		07.15-12.15	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang	

				terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
28.	Sabtu, 14-10-2017	10.00-12.00	Piket KBM	Kegiatan piket KBM ini sebagai pengganti karena hanya ada 1 mahasiswa yang berada di ruang piket. Kegiatan ini meliputi setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
		12.30-14.00	Praktik Mengajar di Kelas X IPA 3	Kegiatan belajar mengajar di laksanakan di kelas X IPA 3 dengan materi pembelajaran tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. 30 siswa mengikuti pembelajaran ini.	
29.	Senin, 16-10-2017	07.00-09.00	Menyusun RPP	Kegiatan menyusun RPP dilaksanakan di sekolahan, oleh mahasiswa yang bersangkutan yang menghasilkan 1 rencana pelaksanaan pembelajaran (30 lembar).	
		09.00-11.00	Konsultasi	Kegiatan ini menghasilkan terkonsultasinya RPP untuk 2 jam pelajaran dan mendapatkan beberapa masukan, yang	

		11.00-16.00	Mengumpulkan materi, membuat media dan membuat sheet PPT	diberikan oleh guru pamong Kegiatan ini dilaksanakan di basecamp PLT UNY yang bertujuan untuk persiapan mengajar, hasil kualitatifnya yaitu tersusunnya 1 PPT dengan 6 sheet, dan 7 lembar rangkuman materi dan membuat media berupa little paper.	
30.	Selasa, 17-10-2017	06.30-09.30	Menyusun RPP	Kegiatan menyusun RPP dilaksanakan di sekolah, oleh mahasiswa yang bersangkutan yang menghasilkan 1 rencana pelaksanaan pembelajaran (35 lembar).	
		09.30-10.30	Konsultasi	Kegiatan ini menghasilkan terkonsultasinya RPP untuk 2 jam pelajaran dan mendapatkan beberapa masukan, yang diberikan oleh guru pamong	
		10.30-15.30	Mengumpulkan materi, membuat media dan membuat sheet PPT	Kegiatan ini dilaksanakan di basecamp PLT UNY yang bertujuan untuk persiapan mengajar, hasil kualitatifnya yaitu tersusunnya 1 PPT dengan 6 sheet, dan 17 lembar rangkuman materi dan membuat media berupa little paper.	
31.	Rabu, 18-10-2017	06.15-07.17	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA	

		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	<p>N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 5 orang bapak/ibu gurur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.</p> <p>Kegiatan praktik mengajar di kelas X IPA 2, dengan diamati oleh guru pamong. Materi yang diajarkan mengenai Good governance dan partisipasi politik, Siswa hadir (28 siswa), siswa aktif mengikuti mata pelajaran PKn, kemudian siswa disuruh melakukan pengamatan terhadap video yang ditayangkan oleg guru.</p>	
32.	Kamis, 19-10-2017	08.45-10.30	Mengajar di kelas XII IPA 4	<p>Kegiatan belajar mengajar di kelas XII IPA 4 diisi oleh 2 mahasiswa PLT, siswa hadir 31 siswa (1 ijin). Siswa presentasi. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan artinya sisiwa aktif mngikuti pembelajaran.</p>	
		10.30-14.00	Piket perpustakaan	<p>Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta,</p>	

				kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
33.	Jumat, 20-10-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal.	
		07.15-8.45	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas,kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
		08.54-09.15	Mengajar di kelas XII IPA 3	Kegiatan mengajar di kelas XII IPA 3 berjalan dengan lancar, siswa hadir 31 siswa. siswa presentasi mengenai kode etik jurnalistik (dampak).	

34.	Sabtu. 21-10-2017	07.15-08.45	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 3 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.
		08.45-10.30	KBM di kelas XII IPA 6	Kegiatan mengajar dilaksanakan di kelas XII IPA 6, Oleh 2 mahasiswa bersangkutan, siswa hadir 32 siswa, materi yang diajarkan yaitu “dampak kode etik”, metode yang digunakan yaitu siswa disuruh membuat pertanyaan kemudian dikumpul dalam satu kotak. Lalu yang akan menjawab adalah temannya, dengan mengambil undian.
		10.30-12.00	KBM di kelas XII IPS 1	Kegiatan mengajar dilaksanakan di kelas XII IPA 6, Oleh 2 mahasiswa bersangkutan, siswa hadir 32 siswa, materi yang diajarkan yaitu “dampak kode etik”, metode yang digunakan yaitu siswa disuruh membuat pertanyaan

		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas X IPA 3	<p>kemudian dikumpul dalam satu kotak. Lalu yang akan menjawab adalah temannya, dengan mengambil undian.</p> <p>Kegiatan praktik mengajar di kelas X IPA 3, dengan diamati oleh guru pamong. Materi yang diajarkan mengenai Good governance dan partisipasi politik, Siswa hadir (28 siswa), siswa aktif mengikuti mata pelajaran PKn, kemudian siswa disuruh melakukan pengamatan terhadap video yang ditayangkan oleh guru.</p>	
35.	Senin, 23-10-2017	07.00-14.00	Membuat RPP dan membuat media, serta konsultasi	Kegiatan ini dilaksanakan di basecamp PLT, Kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran bab 4 terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rpp untuk 2 jam pelajaran dan 1 ppt sebagai media pembelajaran.	
36.	Selasa, 24-10-2017	08.00-11.00	Menyusun materi dan membuat butir soal UH BAB 3 beserta kisi-kisi	Kegiatan yang dihasilkan yaitu membuat kisi-kisi soal UH Bab 3, lalu menyusun soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian.	

		11.30-12.30	Konsultasi soal ulangan harian dan kisi-kisi soal	Kegiatan konsultasi dilakukan oleh 2 mahasiswa bersangkutan kepada 1 guru pamong. Kegiatan ini menghasilkan ada beberapa soal (3 soal) yang direvisi. Setelah selesai berkonsultasi lalu merevisi soal sehingga soal siap untuk di print.	
37.	Rabu, 25-10-2017	06.15-07.15	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 5 orang bapak/ibu guur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	
		12.30-14.00	Ulangan harian kelas X IPA 2	Kegiatan penilaian dan evaluasi dilaksanakan di kelas X IPA 2, siswa 30 hadir, siswa aktif mengikuti penilaian(ulangan), siswa mengerjakan 15 butir soal (10 pilihan gandan dan 5 uraian)	
38.	Kamis, 26-10-2017	07.00-12.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 2 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga ruang	

				perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
39.	Jumat, 27-10-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal.	
		07.15-12.15	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
40.	Sabtu, 28-10-2017	12.30-14.00	Penilaian (UH BAB 3)	Dilaksanakan di ruang kelas X IPA 3, Siswa 29 hadir (1 ijin), siswa secara tertib mengikuti penilaian (ulangan). Secara bersama-sama dengan jumlah soal yang dikerjakan, ada 15 pilihan ganda dan 5 essay.	
41.	Senin, 30-10-2017	07.00-09.00	Menyusun RPP	Kegiatan menyusun RPP di laksanakan di ruang	

		09.00-10.00	Konsultasi	perpustakaan, oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang menghasilkan 1 RPP (21 lembar). Kegiatan ini menghasilkan terkonsultasinya RPP untuk 2 jam pelajaran dan mendapatkan beberapa masukan oleh guru pamong.	
		10.00-15.00	Mengumpulkan materi, membuat media dan membuat PPT	Dilaksanakan di basecamp PLT. Bertujuan untuk persiapan mengajar. Hasil kualitatifnya yaitu tersusunnya 1 PPT dengan 16 sheet dan 4 lembar media untuk membuat mind mapping.	
42.	Selasa, 31-10-2017	08.45-10.30	KBM di kelas XII S3	Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kelas XII S3 dengan jumlah siswa hadir 30 siswa (2 ijin sakit). Materi “penyalahgunaan dan dampak pers”. Siswa berdiskusi untuk menganalisis suatu kasus.	
		10.30-12.00	KBM di kelas XII A 1	Kegiatan KBM dilaksanakan di ruang kelas XII A1 dengan jumlah siswa hadir 31 siswa (1 sakit). Materi tentang “penyalahgunaan dan dampak pers”. Siswa diskusi lalu	

				presentasi.	
43.	Rabu, 1-11-2017	06.15-17.15	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 3 orang bapak/ibu guur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	Kegiatan ini dilaksanakan di kelas X A2 oleh mahasiswa bersangkutan, siswa hadir semua (30 siswa), hasil kualitatif nya yaitu siswa dapat mengidentifikasi pengertian, nilai, dimensi, prinsip, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah.	
44.	Kamis, 2-11-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
45.	Jumat, 3-11-2017	06.15-07.15	Pendampingan afeksi	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28	

		07.15-12.15	Piket KBM	<p>siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.</p>	
46.	Sabtu, 4-11-2017	07.15-10.15	Pembuatan laporan PLT	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencicil laporan PLT dengan mengerjakan rekapan-rekapan lampiran dan mengerjakan BAB 1.	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	Kegiatan ini dilaksanakan di kelas X A2 oleh mahasiswa bersangkutan, siswa hadir 26 siswa (Ijin 4), hasil kualitatif nya yaitu siswa dapat mengidentifikasi pengertian, nilai, dimensi, prinsip, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah.	

47.	Senin, 6-11-2017	07.15-12.15	Piket KBM	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 3 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan ijin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudia keliling ke seluruh kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
48.	Selasa, 7-11-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
49.	Rabu, 8-11-2017	06.15-07.15	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 5 orang bapak/ibu guur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	

		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	Kegiatan praktik mengajar di kelas X IPA 2, oleh mahasiswa bersangkutan. Siswa hadir 30 siswa. Dengan materi yang diajarkan yaitu otonomi daerah dan desentralisasi, siswa disuruh mempresentasikan <i>mind mapping</i> yang sudah dibuat minggu lalu.	
50.	Kamis, 9-11-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam dan atau mengembalikan buku.	
51.	Jumat, 10-11-2017	06.15-07.15 07.15-12.15	Pendampingan afeksi Piket KBM	Kegiatan dilaksanakan di kelas X IPA 4, Pendampingan afeksi dilakukan oleh 1 mahasiswa dan diikuti oleh 28 siswa. Kegiatan diawali dengan membaca al-qur'an, kemudian pengedaran kotak amal. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Piket, yang dilaksanakan oleh 5 mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan meliputi : memberikan izin kepada peserta didik yang terlambat untuk masuk kelas, kemudian keliling ke seluruh	

				kelas setiap pergantian jam pelajaran untuk mengetahui apakah apakah ada kelas yang kosong , serta menerima tamu jikalau ada.	
52.	Sabtu, 11-11-2017	08.45-10.30	Pendampingan belajar kelas XII	Kegiatan ini dilaksanakan dikelas XII IPA 6, siswa disuruh mengerjakan LKS BAB 2 yaitu tentang sistem pemerintahan.	
		10.30-12.00	Pendampingan belajar kelas XII	Kegiatan dilaksanakan dikelas XII IPA 6 dan XII IPS 1, siswa disuruh mengerjakan LKS, dan mendampingi siswa apabila ada yang mau ditanyakan.	
		12.30-14.00	Praktik mengajar di kelas	Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan di kelas X IPA 3, oleh mahasiswa yang bersangkutan dan 30 siswa hadir. siswa mempresentasikan tugas mind mapping yang telah dibuat., siswa aktif mengikuti pembelajaran.	
53.	Senin, 13-11-2017	07.00-14.00	Piket perpustakaan	Kegiatan dilaksanakan oleh 2 mahasiswa bersangkutan dan 1 guru di ruang perpustakaan SMA N 11 Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan meliputi menjaga r perpustakaan jika ada pengunjung perpustakaan yang akan meminjam	

				dan atau mengembalikan buku.	
54.	Selasa, 14-11-2017	07.00-14.00	Mmebuat laporan PLT	Dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk mengerjakan laporan PLT , kegiatan yang dilakukan ini menghasilkan terselesaikannya laporan PLT Berupa BAB 1,2,3 beserta lampiran sebanyak ±200 lembar.	
55.	Rabu, 15-11-2017	06.15-07.15	Piket 3S	Kegiatan piket 3S dilaksanakan di depan pintu masuk SMA N 11 Yogyakarta, dilaksanakan oleh 3 mahasiswa PLT UNY, dan beberapa mahasiswa UST dan USD serta 5 orang bapak/ibu guur. Siswa menympar guru/mahasiswa yang piket dengan cara menyalami, menyapa dan memberi senyum.	
		07.15-12.00	Menyelesaikan laporan	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan laporan yang belum selesai, yakni mengumpulkan lampiran-lampiran (catatan harian, jadwal KBM, kalender akademik, dll).	
		12.00-13.00	Penarikan Mahasiswa PLT	Dilaksanakan di ruang AVA yang di hadiri oleh 19 mahasiswa PLT, Kepala sekolah, koordinator PLT, Guru	

				Pamong, dan 1 DPL. Kegiatan ini dilakukan untuk menarik mahasiswa praktikan dari magang 3 tersebut.	
--	--	--	--	---	--



KARTU BIMBINGAN PLT DI LOKASI

F04

untuk mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

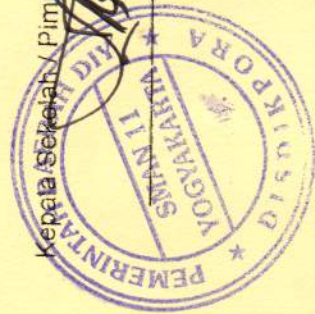
NOMOR LOKASI
 NAMA SEKOLAH/LEMBAGA SMA N 11 YOGYAKARTA
 ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA Jl. A.M. Saugah No 50 Condonginingrat
 NAMA DPL Sri Hartini, M. Hum

No	Hari/Tgl. Kehadiran	Jml. Mhs.	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda tangan DPL
1	Jumat 6/10/2017	2	Keuangan Lembaga - Lembaga Negara		
2	Jumat 9/10/2017	2	Otonomi daerah dan Pengkondisian kelas		
3	Jumat 20/10/2017	2	Evaluasi / Penilaian Siswa		
4	Jumat 10/10/2017	2	Konultasi laporan		

*1) Coret yang tidak perlu

Mengetahui

Kepala PP PPL & PKL



Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga

Ketua Kelompok PLT



KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018



JULI 2017

AHAD	2	9	16	23	30
SENIN	3	10	17	24	31
SELASA	4	11	18	25	
RABU	5	12	19	26	
KAMIS	6	13	20	27	
JUMAT	7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29

AGUSTUS 2017

	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		

SEPTEMBER 2017

	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

OKTOBER 2017

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

NOVEMBER 2017

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		

DESEMBER 2017

AHAD	3	10	17	24	31
SENIN	4	11	18	25	
SELASA	5	12	19	26	
RABU	6	13	20	27	
KAMIS	7	14	21	28	
JUMAT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

JANUARI 2018

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

FEBRUARI 2018

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22		
2	9	16	23		
3	10	17	24		

MARET 2018

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

APRIL 2018

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

M EI 2018

AHAD	6	13	20	27	
SENIN	7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

JUNI 2018

	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

JULI 2018

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

- Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
- Pakaian Dinas Tradisional
- Porsenitas
- PAS/ PAT
- Ujian Nasional
- Ujian Susulan
- Ujian Sekolah

- PTS
- Purna Siswa Kelas XII
- Hari Libur Nasional
- Hari Guru Nasional
- Penyerahan LHP
- HUT Sekolah
- Libur Semester
- Libur Idul Fitri
- Hari Pendidikan Nasional
- Hari Kebangkitan Nasional

- Outbound/ Studi Lapangan Kelas X
- Karya Wisata Kelas XI

Yogyakarta, 3 Juli 2017
Kepala Sekolah

Rudy Rumanto, S.Pd.
NIP. 196503121994121003

PERHITUNGAN MINGGU DAN JUMLAH JAM EFEKTIF
SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas : X (Sepuluh)
Semester : 1 (Gasal)
Tahun Ajaran : 2017-2018

No	Bulan	Jumlah Minggu Dalam Semester	Jumlah Minggu Tidak Efektif	Jumlah Minggu Efektif
1	Juli	4	2	2
2	Agustus	5	0	5
3	September	4	0	4
4	Oktober	4	0	4
5	November	5	0	5
6	Desember	4	2	2
	Jumlah	26	4	22

Rincian : Jumlah Pembelajaran yang efektif

= 22 minggu x 2 jam pelajaran = 44 jam pembelajaran

Dipergunakan untuk :

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Materi	Jml Jam	Ket.
1	Siswa mampu: 1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahnNegara 3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara 4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .		
		a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.	4	
		b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.	2	
		c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.	2	
2	Sisiwa mampu : 1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.		
		a. Wilayah Negara Kesatuan Republik	2	

	<p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2.menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<p>Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	
3	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut</p>	<p>Kewenangan lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia.</p> <p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>d. Partisipasi warga negara dalam sistem</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p>	

	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	politik RI .		
4	Siswa mampu : 1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil . 2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hubungan pemerintahan pusat dan daerah. a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah. c. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.	2 2 2	
5	Siswa mampu: 1.5.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.5.Menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.5.Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. a. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. b. Konsep Integrasi Nasional. c. Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional. d. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 2 2 2	

	4.5.Menyaji faktor-faktor pembentuk integrasinasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	e. Peran serta warga negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2	
6	Siswa mampu: 1.6.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.6.Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.6.Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6.Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.		
		a. Ancaman terhadap integritas nasional	2	
		b. Ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	4	
		c. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional.	2	
7	Siswa mampu: 1.7.Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil . 2.7.Mengamalkan nilai-nilai wawasan	Arti pentingnya Wawasan Nusantara.	2	
		a. Konsep Wawasan Nusantara.	2	
		b. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara.	2	

	<p>nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3.7.Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4.7.Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	c. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara.	3	
		d. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara.	2	
			44	

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

**PROGRAM TAHUNAN
SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA**

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas	: X (Sepuluh)
Semester	: 1 (Gasal)
Tahun Ajaran	: 2017-2018

A. KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Semt	Jml Jam	Ket.
1	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>	Semester 1	10 JP	
2	<p>Sisiwa mampu :</p> <p>1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2.menyaji hasil analisis tentang</p>			10 JP

	ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.			
3	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.3.menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		10 JP	
4	<p>Siswa mampu :</p> <p>1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil .</p> <p>2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan</p>		12 JP	

	<p>daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			
5	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.5.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.5.Menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.5.Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5.Menyaji faktor-faktor pembentuk integrasinasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>		8 JP	
6	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.6.Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.6.Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.6.Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi,</p>		8 JP	

	<p>politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>4.6.Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p>			
7	<p>Siswa mampu:</p> <p>1.7.Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil .</p> <p>2.7.Mengamalkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3.7.Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4.7.Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>		8 JP	

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastris, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

PROGRAM SEMESTER

SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : X (Sepuluh)

Semester : 1 (Gasal)

Tahun Ajaran : 2017-2018

No	KOMPETENSI DASAR	Materi Pokok	Jml Jam	Juli				Agustus					September				Oktober				November					Desember							
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4				
1.	Siswa mampu: 1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu	BAB 1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.																															

	<p>bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p>		<p>2</p>		<p>2</p> <p>2</p>										
--	--	--	----------------------------	--	----------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	Penilaian Harian 1	2					2											
3.	<p>Sisiwa mampu :</p> <p>1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan</p>	<p>BAB 2. Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan</p>	2				2		2									

	<p>Negara Republik Indonesian Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.1.menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia.</p> <p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>d. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI .</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>						2							
									2							

SILABUS

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas : X (Sepuluh)

Semester : I (Satu)

Kompetensi Inti

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1.Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahnNegara</p> <p>3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>4.1.Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan serta Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-orderthinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, 	<p>Sikap : Spiritual, Sosial</p> <p>Pengetahuan : Tes Tertulis. Penilaian Harian 1</p> <p>Penugasan : Aktivitas kelompok, Uji kompetensi</p>	<p>8 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku teks Siswa Kelas X • Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara • Buku Penugasan lainnya

		<p>memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 			
<p>1.2.menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.</p> <p>2.2.mengamalkan nilai-nilai yang</p>	<p>Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, 	<p>Sikap : Spiritual, Sosial</p> <p>Pengetahuan : Tes Tertulis, Penilaian Harian 2</p>	<p>8 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku teks Siswa Kelas X • Buku Penunjang Lainnya yang relevan

<p>terkandung dalam Undang-sundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan .</p> <p>3.2.menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4.2.menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>	<p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.</p>	<p>warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan 	<p>Penugasan : Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p> <p>Keterampilan : Unjuk Kerja : Diskusi Proyek</p>		
--	---	--	---	--	--

		<p>kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 			
<p>1.3.menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.</p> <p>2.3.menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara</p>	<p>Kewenangan lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia.</p> <p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara. • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan 	<p>Sikap : Spiritual, Sosial</p> <p>Pengetahuan : Tes Tertulis, Penilaian Harian 3</p>	<p>6 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Teks Siswa Kelas X • Buku Penunjang Lainnya yang relevan

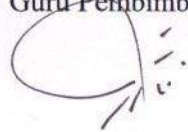
<p>Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.menganalisis kewenangan lembaga- lembaga Negara menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3.menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>d. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI .</p>	<p><i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang kewenangan lembagalembaga Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan penuh disiplin dantanggung jawab tentang kewenangan lembaga- lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangkewenangan lembaga- lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	<p>Penugasan : Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p> <p>Keterampilan : Unjuk Kerja : Diskusi Proyek</p>		
<p>1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Hubungan pemerintahan pusat dan daerah.</p> <p>a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) 	<p>Sikap : Spiritual, Sosial</p> <p>Pengetahuan :</p>	<p>8 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku teks Siswa Kelas X • Buku

<p>1945 secara adil .</p> <p>2.4.Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.4.Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .</p> <p>4.4.Menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>c. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.</p>	<p>tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara pro-aktif dan responsif dengan menggunakan <i>highorder-thinking skills</i> (HOTS) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah • Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah • Menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis data dan hasil proyek Kewarganegaraan secara pro aktif 	<p>Tes Tertulis, Penilaian Harian 4</p> <p>Penugasan : Aktivitas Kelompok Uji Kompetensi</p> <p>Keterampilan : Unjuk Kerja : Diskusi Proyek</p>		<p>Penujangan Lainnya yang Relevan.</p>
---	--	--	---	--	---

		dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah			
--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA N 11 YOGYAKARTA
Mata pelajaran	: PPKn
Kelas / Semester	: X / 1
Materi Pokok	: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit (90 menit)

A. KOMPETENSI INTI

- Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial**
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan**
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan**
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1.Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1.1.1. Siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bahwa nilai-nilai pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan negara. 1.1.2. Siswa membengun nilai-nilai

	toleransi dan kejujuran dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara.
2.1.Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<p>2.1.1. Siswa dapat menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggungjawab dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>2.1.2. Siswa berperilaku yang santun dan toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p>
2.1.Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<p>2.1.1. Siswa mampu menganalisis konsep pembagian kekuasaan di Indonesia baik secara vertikal maupun horisontal.</p> <p>2.1.2. Siswa mampu menjelaskan tugas dan wewenang lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia.</p> <p>2.1.3. Siswa mampu menjelaskan tugas kementerian Negara Republik Indonesia.</p> <p>2.1.4. Siswa mampu mengklasifikasikan Kementerian Negara.</p> <p>2.1.5. Siswa mampu menjelaskan fungsi lembaga non Kementerian.</p> <p>2.1.6. Siswa mampu menganalisis nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara..</p> <p>2.1.7. Siswa mampu menguraikan ciri-ciri umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan nilai-nilai pancasila.</p>
4.1.Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam	4.1.1. Siswa mampu menyaji hasil analisis tentang

kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	<p data-bbox="1029 231 1365 486">pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p data-bbox="935 505 1438 927">4.1.2. Siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>
---	---

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
- Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
- Menampilkan sikap kerjasama terkait Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
- Menampilkan sikap tanggung jawab terkait Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- Menganalisis konsep pembagian kekuasaan di Indonesia baik secara vertical maupun horisontal dengan baik dan benar.
- Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia dengan baik dan benar.
- Menjelaskan tugas kementerian Negara Republik Indonesia dengan baik dan benar.
- Mengklasifikasikan Kementerian Negara dengan baik dan benar.
- Menjelaskan fungsi lembaga non Kementerian dengan baik dan benar.
- Menguraikan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan Negara dengan tepat.

- g. Menguraikan ciri-ciri umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan baik dan benar.
- h. Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan jelas.
- i. Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan jelas.

D. Fakta, Konsep, Prinsip. dan Prosedur Pembelajaran

1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara republik indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
- b. Konsep/pengertian tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara republik indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian
- c. Konsep/pengertian tentang nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kementerian negara republik indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian
- c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Prosedur

- a. Prosedur atau tata cara dalam proses yang berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
- b. Prosedur atau tata cara dalam proses yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi kementerian republik indonesia dari lembaga pemerintahan non kementerian

- c. Prosedur atau tata cara dalam proses yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Metode Pembelajaran

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” adalah :

1. Metode : *Scientific Learning*
2. Strategi : Inquiry Learning dan Diskusi dalam kelompok

F. Media dan bahan

1. Media
 - a. Video tentang sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia
 - b. Video tentang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - c. Gambar Sidang Paripurna
 - d. Gambar Kementerian Negara
 - e. Gambar Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - f. Bagan pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia.
 - g. PPT Tentang Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia
 - h. PPT tentang Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
 - i. PPT Tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Alat/Bahan

- a. LCD, *Proyektor*
- b. Laptop
- c. *White board*
- d. Spidol
- e. Kertas
- f. bolpoin

G. Sumber belajar

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X* Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal 2-20.
2. Jimly Assidiqi. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- 6 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 7 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 8 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 11 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia.

H. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

No	Rincian Kegiatan	Alokasi Waktu
1	<p>Kegiatan Pendahuluan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin do'a di depan kelas. c. Guru mengucapkan selamat kepada peserta didik baru kelas X yang telah masuk ke SMA N 11 Yogyakarta d. Guru memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bisa bersyukur karena masih dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi e. Guru memperkenalkan diri dengan siswa selaku 	10 menit

	<p>guru mata pelajaran PPKn</p> <p>f. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.</p> <p>g. Guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan ditempuh siswa selama dua semester.</p> <p>h. Guru memberikan apersepsi dan mengaitkan materi yang telah diajarkan ketika SMP dengan materi yang akan dipelajari.</p> <p>i. Guru menjelaskan materi ajar, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.</p>	
2	<p>Kegiatan Inti:</p> <p>a. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati Video tentang pembagian kekuasaan negara Indonesia. • Peserta didik menelaah materi tentang pembagian kekuasaan negara Indonesia. <p>b. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi dan video yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda. • Peserta didik lain di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya. <p>c. Mengumpulkan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengumpulkan informasi tentang sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, koran, atau internet yang relevan. <p>d. Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dengan bimbingan guru mengerjakan tugas kelompok tentang konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia dan pembagian kekuasaan baik secara vertikal dan horisontal di Indonesia. 	70 menit

	<p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi mereka • Peserta didik yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan teman lainnya. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil peserta didik. 	
3	<p>Kegiatan Penutup:</p> <p>a. Peserta didik dibimbing Guru untuk membuat generalisasi/kesimpulan materi pembelajaran.</p> <p>b. Peserta didik dibimbing Guru melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang telah dialami.</p> <p>c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil diskusi kelompok.</p> <p>d. Guru memberi informasi tentang kegiatan pada pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya.</p> <p>e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar dan diakhiri dengan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup.</p>	10

2. Pertemuan Kedua

No	Rincian Kegiatan	Alokasi Waktu
1	<p>Kegiatan Pendahuluan:</p> <p>a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu.</p> <p>b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin do'a di depan kelas.</p> <p>c. Guru memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bisa bersyukur karena masih dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas X.</p> <p>d. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber</p>	10

	<p>belajar.</p> <p>e. Guru memberikan apersepsi dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi ajar, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik</p>	
	<p>Kegiatan Inti:</p> <p>a. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengamati gambar Sidang Paripurna DPR • Peserta didik mengamati Video tentang Lembaga-lembaga pemegang kekuasaan di Indonesia. • Peserta didik menelaah materi tentang Lembaga pemegang kekuasaan negara Indonesia. <p>b. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi dan video yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda. • Peserta didik lain di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya. <p>c. Mengumpulkan informasi</p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi tentang Lembaga negara pemegang kekuasaan Negara Republik Indoneisa dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, koran, atau internet yang relevan.</p> <p>d. Mengasosiasi</p> <p>Peserta didik dengan bimbingan guru mengerjakan tugas kelompok tentang tugas dan wewenang lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p>	<p>70</p>

	<p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi mereka • Peserta didik yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan teman lainnya. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil peserta didik. 	
3	<p>Kegiatan Penutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik dibimbing Guru untuk membuat generalisasi/kesimpulan materi pembelajaran. b. Peserta didik dibimbing Guru melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang telah dialami. c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil diskusi kelompok. d. Guru memberi informasi tentang kegiatan pada pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar dan diakhiri dengan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. 	10

3. Pertemuan Ketiga

No	Rincian Kegiatan	Alokasi Waktu
1	<p>Kegiatan Pendahuluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin do'a di depan kelas. c. Guru memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bisa bersyukur karena masih dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas X. d. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber 	10

	<p>belajar.</p> <p>e. Guru memberikan apersepsi dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi ajar, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik</p>	
2	<p>Kegiatan Inti:</p> <p>a. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menelaah materi tentang Kementerian Negara dan lembaga non kementerian • Peserta didik menonton video tentang Kementerian Negara dan lembaga non kementerian. • Peserta didik melihat gambar susunan kabinet. <p>b. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi dan video yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda. • Peserta didik lain di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya. <p>c. Mengumpulkan informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang tentang Kementerian Negara dan lembaga non kementerian menggunakan berbagai sumber dari buku, koran, atau internet yang relevan. <p>d. Mengasosiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta didik dengan bimbingan guru mengerjakan tugas kelompok tentang Kementerian Negara dan lembaga non kementerian. <p>e. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi mereka 	70

	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan teman lainnya. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil peserta didik. 	
3	<p>Kegiatan Penutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik dibimbing Guru untuk membuat generalisasi/kesimpulan materi pembelajaran Peserta didik didik dibimbing Guru melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang telah dialami. b. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil diskusi kelompok. c. Guru memberi informasi tentang kegiatan pada pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar dan diakhiri dengan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. 	10

4. Pertemuan Keempat

No	Rincian Kegiatan	Alokasi Waktu
1	<p>Kegiatan Pendahuluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin do'a di depan kelas. c. Guru memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bisa bersyukur karena masih dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas X. d. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. e. Guru memberikan apersepsi dan mengaitkan 	10 menit

	<p>dengan materi yang akan dipelajari.</p> <p>f. Guru menjelaskan materi ajar, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik</p>	
2	<p>Kegiatan Inti:</p> <p>a Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menelaah materi tentang nilai-nilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. <p>b Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang ditelaah • Peserta didik lain di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya. <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi <p>3. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang nilai-nilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa menggunakan berbagai sumber dari buku, koran, atau internet yang relevan.</p> <p>e. Mengasosiasi</p> <p>4. Peserta didik dengan bimbingan guru mengerjakan tugas kelompok tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa.</p> <p>f. Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi mereka • Peserta didik yang lainnya menanggapi hasil pekerjaan teman lainnya. • Guru memberikan klarifikasi dan penguatan hasil peserta didik. 	70 menit
3	<p>Kegiatan Pentutup:</p> <p>a. Peserta didik dibimbing Guru untuk membuat generalisasi/kesimpulan materi pembelajaran.</p> <p>b. Peserta didik didik dibimbing Guru melakukan refleksi dengan meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang telah</p>	10 mneit

	<p>dialami.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil diskusi kelompok.c. Guru memberi informasi tentang kegiatan pada pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya.d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar dan diakhiri dengan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup.	
--	---	--

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Penilaian Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
2	Penugasan	Tugas	Lihat	Saat	Penilaian

		berbentk diskusi kelompok	Lampiran ...	pembelajaran berlangsung	untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
--	--	---------------------------------	--------------	-----------------------------	---

d. Penilaian Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah : SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester : X / 1 (Satu)
Materi Pokok : Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

I. MATERI PEMBELAJARAN

- **Pertemuan Pertama** : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

A. Macam-macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan.

Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya.

C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai soal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur*

(penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu; (i) bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan; (ii) bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu (Kusnardi, 1988: 145).

Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan dwi praja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan).

Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273)

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh **Montesquieu** merupakan penyempurnaan dari pendapat **John Locke**. Kekuasaan federatif oleh **Montesquie** dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori **Montesquieu** ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht,

pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan dibawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya. Konsep Trias Politika yang disampaikan Montesquieu tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Menurut Bachsan Mustafa (*Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara, 1990*) tujuan dari sistem *check and balances* ini adalah: (i) untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu akan bertindak melampaui batas kekuasaannya sehingga merupakan tindakan yang sewenang-wenang; (ii) agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang dalam tiap-tiap keadaan tertentu, sehingga perlu diadakan pengawasan tertentu pula

B. Konsep Pembagian Kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya.

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam

beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? apakah Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan? Untuk menilai apakah UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, kita dapat menggunakan kriteria yang dibuat oleh Ivor Jennings. Jennings dalam bukunya "*The Law and the Constitution*" membuat suatu kriteria untuk menilai apakah suatu UUD menganut teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil (Kusnardi, 1983: 143). Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988) pemisahan kekuasaan dalam arti materil dapat disebut sebagai pemisahan kekuasaan. Sementara pemisahan kekuasaan dalam arti formil disebut dengan pembagian kekuasaan. Jimly Assidique, (2005, 35) berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Berdasarkan kriteria yang dibuat Jennings, Kusnardi dan Harmaily (1988) berkesimpulan bahwa UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena:

- a. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
- b. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja.
- c. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR (Pasal 1 ayat 2), kepada lembaga negara lainnya.

Demikian juga Jimly (2005: 35-36) yang menyatakan bahwa selama ini (sebelum amandemen), UUD 1945 menganut paham pembagian

kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam UUD 1945 yang asli (UUD 1945 sebelum amandemen) tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya (Jimly, 2006: 166)

Namun sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan, dapat kita katakan bahwa Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan. Beberapa bukti tersebut antara lain:

- a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR. Bandingkan dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan
- b. Diadopsikan sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh MK
- c. diakuinya bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya terbatas pada MPR
- d. MPR tidak berstatus sebagai lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara
- e. Hubungan antar lembaga tinggi negara bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.

- **Pertemuan II**

C. Mekanisme Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal (Lubis Yusnawan, 2014:96).

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan

pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undangundang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

f) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang (Lubis Yusnawan, 2014:96-97).

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan (Lubis Yusnawan, 2014:98).

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur

sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Lubis Yusnawan, 2014:98).

- **Pertemuan III**

Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

A. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Seperti kita ketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak.

Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini.

**Kewenangan Presiden Republik Indonesia
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).	Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).	Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).	Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)

Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)	Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).	Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).
. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).	Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4)
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).	Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).	Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).	Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).
	Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).

	Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3)
	Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)

Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- a) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- b) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- c) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- d) *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, perubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- a Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- c Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

B. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan di bawah ini. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri
 - 2) Kementerian Luar Negeri
 - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 - c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - d. Kementerian Keuangan
 - e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - f. Kementerian Perindustrian
 - g. Kementerian Perdagangan
 - h. Kementerian Pertanian
 - i. Kementerian Kehutanan
 - j. Kementerian Perhubungan
 - k. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - l. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - m. Kementerian Pekerjaan Umum
 - n. Kementerian Kesehatan

- o. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- p. Kementerian Sosial
- q. Kementerian Agama
- r. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- s. Kementerian Komunikasi dan Informatika

D. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

- a. Kementerian Sekretariat Negara
- b. Kementerian Riset dan Teknologi
- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- d. Kementerian Lingkungan Hidup
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- g. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- j. Kementerian Perumahan Rakyat
- k. Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- i. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- ii. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- iii. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

C. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah NonKementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab

langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21) Badan SAR Nasional (Basarnas);
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Peran Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan begitu penting. Tugas yang diemban setiap kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian begitu berat. Nah sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendukung setiap program dari setiap kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Wujud dukungan itu antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dari setiap kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
2. Menyampaikan aspirasi kepada kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang sesuai dengan kepentingan yang diaspirasikan.

Mengkritisi dan mengawasi setiap pelaksanaan program kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

5. **Pertemuan Keempat**

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu

agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin *good governance* yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan (*fairness*) yang nondiskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- 3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
- 4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
- 5) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
- 6) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal. o Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
2. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

- 1) Nasionalisme
- 2) Cinta bangsa dan tanah air
- 3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- 5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- 1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.

3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

4. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.

2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		3.3.3	Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik
		3.3.4	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.1	Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara

		4.3.2	Republik Indonesia Tahun 1945. Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
--	--	-------	---

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi Suprastruktur Politik di Indonesia
- b. Mengidentifikasi Infrastruktur Politik di Indonesia
- c. Mengidentifikasi hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik
- d. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik.

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
 - e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
2. Konsep
- a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Konsep/pengertian tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
 - e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
3. Prinsip
- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
 - f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
 - b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI.

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

1. Metode : *Scientific Learning*
2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, Tugas Kelompok, dan penugasan.

F. Media dan bahan

1. Media
 - a. *Power point* tentang indikator ancaman terhadap negara
 - b. Gambartentang ancaman-ancaman terhadap negara di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
2. Alat/Bahan
 - a. LCD, *Proyektor*
 - b. Laptop
 - c. *White board*
 - d. Spidol
 - e. Kertas
 - f. bolpoin

G. Sumber belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.
- e. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik 3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Sistem politik di Indonesia”. 4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Sistem Politik di Indonesia : Suprastruktur politik dan infrastruktur politik”. 5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan. 	10’
<p>b. Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep sistem politik di Indonesia pada <i>Wall Screen</i> mengenai berbagai bentuk sistem politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. b. Guru menjelaskan peranan yang dimiliki oleh suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui media gambar. c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati gambar tentang peranan dan permasalahan sistem politik di Indonesia d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati peranan dan permasalahan yang dihadapi oleh sistem politik di 	70’

Indonesia.

2. Menanya

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa kita sebagai warga negara perlu membentuk suatu kelompok-kelompok kepentingan ?
- b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara *klasikal* untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar yang ditampilkan.
- c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan peranan dan permasalahan sistem politik di Indonesia.

3. Mengumpulkan Informasi

- a. Peserta didik membentuk kelompok(5 kelompok)
- b. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok.

4. Mengasosiasi

- a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada *lembar diskusi kelompok*.
- b. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan tugas diskusi kelompok
- c. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis pada *lembar diskusi kelompok*.
- d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi kelompok.

5. Mengkomunikasikan

- a. Guru membimbing setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
- b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya
- c. Guru bersama peserta didik memberikan *apresiasi* dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik.

<p>c. Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru. 2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem politik di Indonesia. 3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami. 4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. 5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.2. tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”. 6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. 	10’
--	-----

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Penilaian Sikap Sosial

No .	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)

d. Penilaian Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

I. MATERI PEMBELAJARAN

Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat, sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di orde lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monoteks terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Suprastruktur

Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut *Pamudji*, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut *Rusadi Kantaprawira*, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah *suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional*.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain.

- a. Daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan

sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya,

tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat buruh dan sebagainya.

- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.
- e. **Tokoh Politik (*Political Figure*)**, tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga setiap pendapat/pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Biasanya ia mempunyai kemampuan oratoris kharismatik yang mampu mempersatukan, juru penengah, dan memanipulasi simbol-simbol sehingga dapat mengendalikan massa.

3. Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik.

Di negara dengan sistem politik demokrasi, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras dan seimbang, dalam menentukan kebijakan umum. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana masukan (input) yang berwujud pernyataan, keinginan-keinginan dan tuntutan masyarakat, sedangkan suprastruktur politik yaitu pemerintah dalam arti luas berfungsi sebagai output dalam hal menentukan public policy yang berwujud keputusan-keputusan politik sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

Skor Perolehan

Nilai = ----- X 100

12

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadangbertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3,apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2,apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1,apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 3.1

Tugas Kelompok

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5-6 siswa

2. Bersama teman sekelompok, identifikasikan contoh peranan dan masalah yang dihadapi infrastruktur politik di Indonesia, kemudian masukkan ke dalam kolom berikut :

No	Infrastruktur Politik di Indonesia	Contoh Peranan

KUNCI JAWABAN TUGAS KELOMPOK

No	Infrastruktur Politik di Indonesia	Contoh Peranan
1	Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau <i>out out</i> pada umumnya. • Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan) • Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
2.	Kelompok Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. • Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang

		<p>mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.</p>
3.	Kelompok Penekan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju. • Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya. • Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.
4.	Alat Komunikasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat. • Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum. • Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya (media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya). Media dalam hal ini menjadi fasilitator. • Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang

		<p>diajarkan oleh orang tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima.
5.	Tokoh Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Lembaga - Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan m

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		3.3.3	Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik Menunjukkan partisipasi warga

		3.3.4	negara dalam sistem politik RI
4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.1	Menyajikan hasil identifikasi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI dalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut UUD 1945
- b. Mengidentifikasi Fungsi lembaga-lembaga negara republik Indonesia menurut UUD 1945
- c. Mengidentifikasi Wewenang lembaga-lembaga negara republik Indonesia menurut UUD 1945
- d. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang wewenang lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen.

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
- d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
- b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
- c. Konsep/pengertian tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI
- d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.

3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.

- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
 - f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
 - b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI.

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

1. Metode : *Scientific Learning*
2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, *Matching Game* (permainan mencocokkan), dan Tugas Kelompok.

F. Media dan bahan

1. Media
 - a. *Power point* tentang skema susunan beserta tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara.
 - b. *Matching Game* tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara
2. Alat/Bahan
 - a. LCD, *Proyektor*
 - b. Laptop
 - c. *White board*
 - d. Spidol
 - e. Kertas (Karton, HVS Berwarna)
 - f. Bolpoin

G. Sumber belajar

- a. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- b. Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- f. Taniredja, Tukiran. 2012. *Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- g. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik	10'

<ol style="list-style-type: none"> 3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Sistem politik di Indonesia : Suprastruktur dan Infrastruktur politik” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”. 4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Lembaga- Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945”. 5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan. 	
<p>b. Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati <ol style="list-style-type: none"> a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep mengenai Lembaga- Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945 pada <i>Wall Screen</i>. b. Guru menjelaskan susunan dan kedudukan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945 beserta tugas dan wewenangnya. c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati gambar tentang skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, kemudian mengidentifikasi tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI. d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati skema susunan dan kedudukan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945. 2. Menanya <ol style="list-style-type: none"> a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa kita sebagai warga negara perlu mengetahui tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia ? b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab <i>klasikal</i> berkenaan dengan tugas dan wewenang Lembaga- 	70’

<p>Lembaga Negara RI menurut UUD 1945.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui <i>Matching Game</i> dengan diarahkan oleh guru. b. Peserta didik membentuk kelompok (8 kelompok : berdasarkan <i>Matching Game</i> yang sudah dilakukan oleh siswa) c. Peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. d. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok. <p>4. Mengasosiasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada <i>lembar diskusi kelompok</i>. b. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan tugas diskusi kelompok c. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis pada <i>lembar diskusi kelompok</i>. d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi kelompok. <p>5. Mengkomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru membimbing setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya c. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik. 	
<p>c. Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru. 2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. 	10'

<p>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</p> <p>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara.</p> <p>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.3. tentang “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.</p> <p>6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</p>	
---	--

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Penilaian Sikap Sosial

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)

2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
---	-----------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

d. Penilaian Keterampilan

No	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

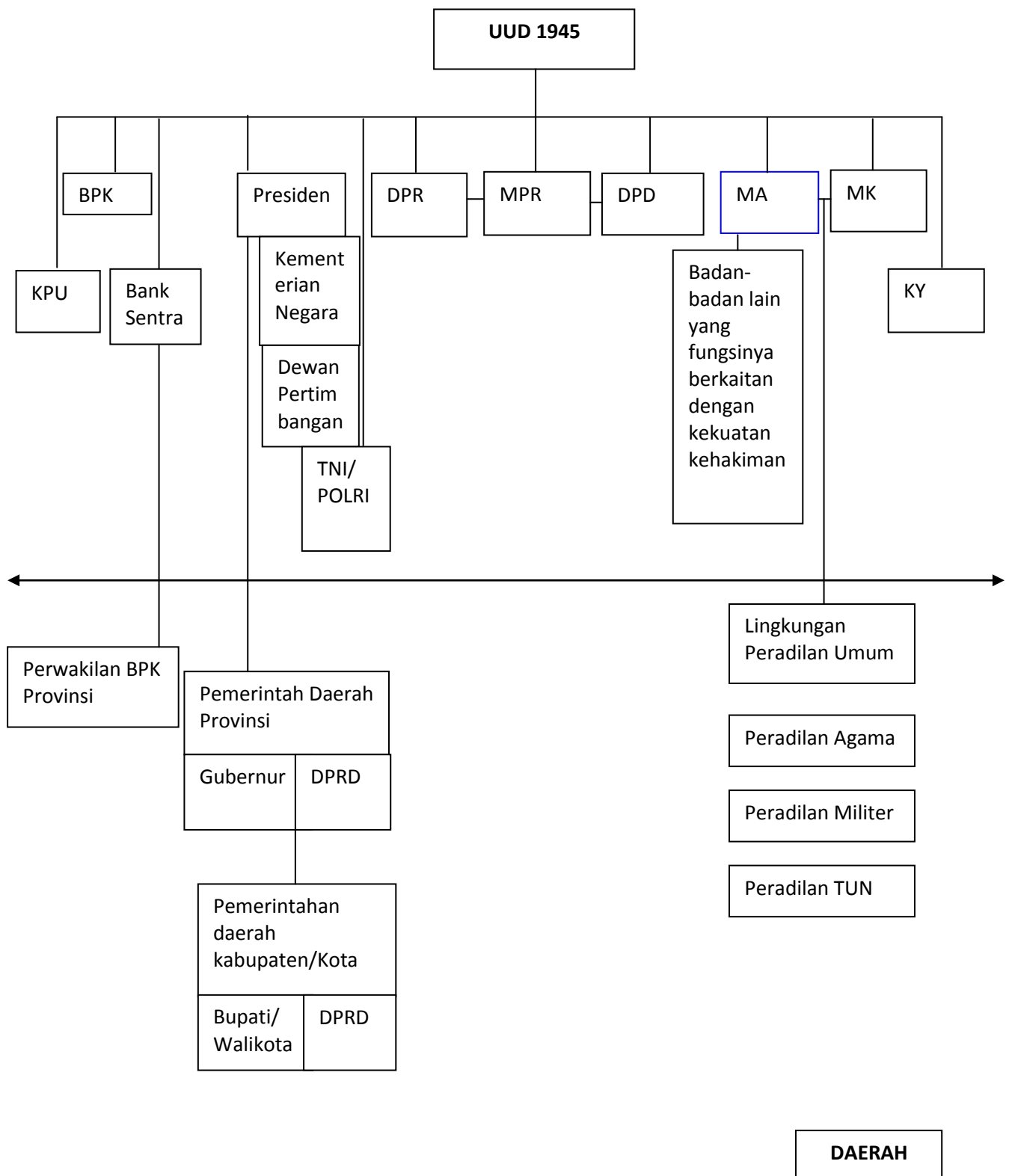
I. MATERI PEMBELAJARAN

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau “civilized organization” dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara nya sendiri. Lembaga-lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing.

Sebagai konstitusi Indonesia, UUD 1945 mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, dari tugas, fungsi, wewenang, serta susunan dan kedudukannya. Lembaga-lembaga tinggi negara yang merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik indonesia meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- b. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- c. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Presiden

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.
 - 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
 - 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)

- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
- 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
- 12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

5. Mahkamah Agung (MA)

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6. Mahkamah Konstitusi

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
 - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7. Komisi Yudisial (KY)

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

Skor Perolehan

Nilai = ----- X 100

12

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 3.2.

Matching Game

(Permainan Mencocokkan)

Lembaga – Lembaga Negara

Majelis	Dewan	Dewan	PRESIDEN
---------	-------	-------	----------

Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Perwakilan Rakyat (DPR)	Perwakilan Daerah (DPD)	
Mahkamah Agung (MA)	Mahkamah Konstitusi (MK)	Komisi Yudisial (KY)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tugas Dan Wewenang :

1. MPR

- a. Mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar
- b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR
- c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

2. DPR

- a. Membentuk undang-undnag yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY.
- c. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan anggota DPD.
- d. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta dari negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- e. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

3. DPD

Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Presiden

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- c. Menyatakan keadaan bahay.

5. MA

- a. Kekuasaan dan permohonan kasasi (tingkat banding akhir)
 - b. Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
 - c. Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan.
6. MK
- a. Mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945
 - b. Memutuskan pembubaran partai politik
 - c. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
7. KY
- a. Membantu pengembangan sistem pendidikan untuk peningkatan kapasitas kualitas hakim.
 - b. Merekomendasikan promosi dan mutasi hakim
 - c. Menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
8. BPK
- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
 - b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

TUGAS KELOMPOK

Lembaga :
Kelas :
Nama Kelompok : 1.
2.
3.
4.

Diskusikan bersama kelompok anda, kemudian Jawab pertanyaan pada tabel berikut secara tepat !

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas Dan Wewenang
1.			

KUNCI JAWABAN TUGAS KELOMPOK

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Wewenang
1	Majelis Permusyawar	Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945	a. Mengubah serta menetapkan UUD. b. Melantik Presiden serta Wakil

	<p>atan Rakyat (MPR)</p>	<p>Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.</p> <p>c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.</p> <p>d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.</p> <p>e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.</p> <p>f. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnnya dalam waktu 30 hari.</p> <p>g. Menetapkan peraturan tata tertib</p>
--	------------------------------	--

			Mserta kode etik PR.
2	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945	<p>a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama</p> <p>b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.</p> <p>c. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD</p> <p>d. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I</p> <p>e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat</p>
3	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Pasal 23F ayat (1) UUD 1945	<p>a. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang</p>

			<p>DPD untuk membahas RUU tersebut.</p> <p>b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama</p> <p>c. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN</p>
4	Presiden	<p>Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal</p>	<p>a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD</p> <p>b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)</p> <p>c. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU</p>

		<p>17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945</p>	<p>bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa) e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri f. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR g. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR h. Menyatakan keadaan bahaya i. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR j. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. k. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung l. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR m. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU n. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) o. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR
--	--	---	---

			<p>p. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung</p> <p>q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.</p>
5	Mahkamah Agung (MA)	Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945	<p>a. Mengadili pada tingkat kasasi</p> <p>b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang</p> <p>c. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.</p> <p>d. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi</p>
6	Mahkamah Konstitusi (MK)	Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945	<p>a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.</p> <p>b. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.</p> <p>c. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.</p> <p>d. Memutus sengketa kewenangan</p>

			<p>antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.</p> <p>e. Memutus pembubaran partai politik</p> <p>f. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.</p>
7	Komisi Yudisial (KY)	Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945	<p>a. Mengawasi perilaku hakim</p> <p>b. Mengusulkan nama calon hakim agung.</p>
8	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945.	<p>a. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.</p> <p>b. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.</p>

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X / Gasal
Materi Pokok : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.3.	Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		1.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2.3.	Mengorganisasikan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	2.3.1	Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		2.3.2	Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.3.	Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
		3.3.2	Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
		3.3.3	Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik
		3.3.4	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3.	Menunjukkan ancaman-ancaman	4.3.1	Menyajikan hasil identifikasi tentang

	terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.3.2	kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
--	---	-------	--

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi pengertian *good governance*
- b. Mengidentifikasi unsur-unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Mengidentifikasi karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- e. Mengidentifikasi persyaratan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- f. Mengidentifikasi hubungan antara Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan struktur pemerintahan.
- g. Mengidentifikasi pengertian dan piramida partisipasi politik.

- h. Mengkomunikasikan hasil identifikasi tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta
 - a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
 - e. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang kurangnya partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
2. Konsep
 - a. Konsep/pengertian tentang Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Konsep/pengertian tentang Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Konsep/pengertian tentang tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara RI
 - d. Konsep/pengertian tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
 - e. Konsep/pengertian tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
3. Prinsip
 - a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik di Indonesia.
 - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga-Lembaga Negara RI
 - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *impeachment* dalam ketatanegaraan RI.
 - d. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
 - f. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.
4. Prosedur

- a. Prosedur atau tata cara dalam proses demokrasi yang merupakan bagian dalam sistem politik Indonesia
- b. Prosedur atau tata cara dalam proses pemilihan ketua lembaga-lembaga Negara RI.

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” adalah :

1. Metode : *Scientific Learning*
2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, Video, dan Tugas Individu.

F. Media dan bahan

1. Media
 - a. *Power point* tentang konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik (yang meliputi pengertian, ciri-ciri, karakteristik dan syarat-syarat) dan partisipasi politik (yang meliputi pengertian, bentuk, dan piramida partisipasi politik).
 - b. Video tentang *Good Governance* dan Partisipasi Politik
2. Alat/Bahan
 - a. LCD, *Proyektor*
 - b. Laptop
 - c. *White board*
 - d. Spidol
 - e. Kertas HVS
 - f. Bolpoin

G. Sumber belajar

- a. Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Ombak.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat

kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.
- e. Taniredja, Tukiran. 2012. Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bandung : Alfabeta.
- f. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik”.4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik”.5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.	10’
<p>b. Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengamati<ol style="list-style-type: none">a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep mengenai Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik pada <i>Wall Screen</i>.b. Guru menjelaskan konsep, ciri-ciri/karakteristik dan syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik. Serta menjelaskan konsep dan piramida partisipasi politik.c. Peserta didik dengan bimbingan guru mengamati video terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik,	70’

kemudian mengidentifikasi bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Yang baik serta peran warga negara dalam sistem politik.

- d. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati video yang ditampilkan oleh guru terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik.

2. Menanya

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa dalam suatu negara diperlukan partisipasi politik ?
- b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dan Partisipasi Politik.

3. Mengumpulkan Informasi

- a. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui pengamatan video dengan diarahkan oleh guru.
- b. Peserta didik secara individu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
- c. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara individu.

4. Mengasosiasi

- a. Peserta didik diberikan waktu oleh guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada *lembar tugas siswa*.
- b. Guru mengamati peserta didik dalam mengerjakan tugas.
- c. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis secara tertulis pada *lembar diskusi siswa*.
- d. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi.

5. Mengkomunikasikan

- a. Guru membimbing siswa secara perwakilan kelas (3 siswa) untuk mempresentasikan hasil analisisnya.
- b. Peserta didik secara bergiliran diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya
- c. Guru bersama peserta didik memberikan *apresiasi* dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik.


<p>c. Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru. 2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi politik. 3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami. 4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi politik. 5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 3.4. tentang “Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. 	<p>10'</p>
---	------------

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik Penilaian :
 - a. Penilaian Sikap : Observasi/Pengamatan
 - b. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis dan Lisan
 - c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja ; Presentasi ; Laporan Penugasan
2. Bentuk Penilaian :
 - a. Observasi : Jurnal Guru
 - b. Tes Tertulis : Uraian
 - c. Unjuk Kerja : Laporan ; Paparan
3. Instrumen Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan (Terlampir)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

I. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis.

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
2. Unsur swasta/wirusaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

- a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.

- b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
- c. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
- d. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
- e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
- 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
- 3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi.
- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
- 7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.

- b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundangundangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
- d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
- e) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

B. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh **Verba**, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.
13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

a. Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuanketentuan atau norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar RI 1945.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

b. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

- 1) Forum warga.
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya.

Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila dan UUD RI 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku.

c. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.

- 1) Pancasila.
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Keputusan Presiden.
- 6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga negara

juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Piramida Partai Politik



II. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi serta menjawab pertanyaan.

Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil analisis terhadap video yang ditayangkan oleh guru yakni mengenai Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Politik.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

Skor Perolehan

Nilai = ----- X 100

12

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran 3.3

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Individu yang diberikan kepada peserta didik.

- Penyekoran tugas individu 3.3
- Soal nomor -5 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal/ skor tertinggi adalah 10.

Skor Perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{10} \times 100$$

Soal Pengetahuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan *good governance*, menurut anda !

.....
....
.....
.....
.....
.....

2. Analisislah hubungan antara pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik !

.....
.....
.....
.....
.....

3. Analisislah bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik !

.....
.....
.....
.....
.....

4. Berikan alasan bahwa Partisipasi Warga Negara sangat penting keberadaannya dalam Sistem Politik di Indonesia !

.....
.....
.....
.....
.....

5. Jelaskan pengertian kesadaran politik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* !

.....
.....
.....

Kunci Jawaban

No	Jawaban	Skor
1.	<p>Yang dimaksud dengan <i>good governance</i> :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.	2
2	<p>Hubungan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Dengan <i>good governance</i> akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan memiliki praktik <i>good governance</i> yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005).	2
3.	<p>Semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.	2

3.	<p>Semua lapisan masyarakat memiliki kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan public :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan/kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, <i>leaflet</i>, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi 	2
4.	<p>Partisipasi Warga Negara sangat penting keberadaannya dalam Sistem Politik di Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. 	2
5.	<p>Pengertian kesadaran politik dalam pelayanan publik untuk mewujudkan <i>good governance</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki 	2

	oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah.	
--	---	--

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1	Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
		3.4.2	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat
		3.4.3	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah

		3.4.4	Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1	Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.4.2	Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- b. Mengidentifikasi Pengertian Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan

- c. Mengidentifikasi Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia
- d. Mengkomunikasikan Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
- e. Mengidentifikasi Tujuan Pemberian Otonomi kepada Daerah

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta
 - a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Konsep
 - a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Prinsip
 - a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
 - a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
 - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
 - c. Prosedur atau tata cara dalam pemilihan kepala daerah

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI” adalah :

Metode : *Scientific Learning*

Strategi : Diskusi kelompok dengan model pembelajaran *Jigsaw*

F. Media dan bahan

1. Media

- a. *Power point* tentang desentralisasi dan otonomi daerah
- b. Gambar tentang gambaran umum desentralisasi dan otonomi daerah
- c. *Mind Mapping* Otonomi Khusus

2. Alat/Bahan

- a. LCD, *Proyektor*
- b. Laptop
- c. *White board*
- d. Spidol
- e. Kertas berwarna
- f. Bolpoin

G. Sumber belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.	10’
<p>b. Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengamati<ol style="list-style-type: none">a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep desentralisasi/otonomi daerah di Indonesia pada <i>Wall Screen</i> mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara.b. Guru menjelaskan Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesiac. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati Makna Otonomi Daerah di Indonesia.	70’

2. Menanya

- a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : Apa saja tujuan dikeluarnya kebijakan Otonomi Daerah ?
- b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara *klasikal* untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan hasil pengamatan terhadap video yang ditampilkan.
- c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab *klasikal* berkenaan dengan otonomi daerah dan otonomi khusus

3. Mengumpulkan Informasi

- a. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok (1 kelompok terdiri dari 6 peserta didik) yang disebut sebagai *kelompok asal* (kelompok otonomo daerah, otonomi khusus DKI, DIY, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam)

Kelompok Asal I : Otonomi Daerah

Kelompok Asal II : Otonomi Khusus DKI

Kelompok Asal III : Otonomi Khusus DIY

Kelompok Asal IV : Otonomi Khusus Papua

Kelompok Asal V : Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

- b. Peserta didik diberikan tugas dan materi yang berbeda untuk tiap anggota dalam 1 (satu) *kelompok asal* :

Kelompok Ahli I : What

Kelompok Ahli II : Why

Kelompok Ahli III : When

Kelompok Ahli IV : Where

Kelompok Ahli V : Who

Kelompok Ahli VI : How

4. Mengasosiasi

- a. Peserta didik dari kelompok yang berbeda (*kelompok asal*) berkelompok dengan kelompok baru (*kelompok ahli*).
- b. Peserta didik secara berkelompok (*kelompok ahli*) mengumpulkan informasi yang relevan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dengan membaca uraian materi pada Buku PPKn Kelas X Bab IV mengenai ‘Desentralisasi atau

<p>otonomi daerah dalam konteks NKRI'. Serta bisa mencari dari referensi lain seperti internet.</p> <p>c. Guru mengamati peserta didik dalam melakukan diskusi <i>kelompok ahli</i>.</p> <p>d. Peserta didik secara mandiri dalam <i>kelompok ahli</i> menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis.</p> <p>e. Guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi <i>kelompok ahli</i>.</p> <p>f. Peserta didik dari <i>kelompok ahli</i> kembali berkelompok dengan <i>kelompok asal</i>, peserta didik secara bergantian melaporkan hasil diskusinya kepada teman 1(satu) <i>kelompok asal</i>.</p> <p>g. Peserta didik secara berkelompok dalam <i>kelompok asal</i> menyusun laporan hasil diskusi secara tertulis menggunakan media <i>Mind Mapping</i> (kertas disediakan oleh guru) berdasarkan informasi <i>ahli I, II, III, IV, V, VI</i>.</p> <p>5. Mengkomunikasikan</p> <p>a. Guru membimbing setiap <i>kelompok asal</i> untuk mempresentasikan hasil diskusi.</p> <p>b. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil diskusi peserta didik..</p>	
<p>c. Penutup</p> <p>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</p> <p>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</p> <p>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan</p>	10'

berikutnya yaitu KD 4.2. tentang “Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah”.	
6. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.	

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Penilaian Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

I. MATERI PEMBELAJARAN

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centerum* yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok *Anglo Saxon* dan *Kontinental*. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. *Devolusi* berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun Kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam

kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3 (tiga) bagian.

- a. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat.
- b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- g. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
- h. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
- i. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
- j. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
- b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.

- e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

2. Otonomi Daerah

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. J. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
- b. J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
- c. Ateng Syarifuddin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.

3. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :

- a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
- b. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Berkaitan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan

penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) *Dimensi Politik*, kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.
- 2) *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- 3) Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

- a. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
- b. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Selain itu terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1) Prinsip Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2) Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3) Prinsip Penyebaran

2. Penilaian Ketrampilan

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil diskusi terkait otonomi daerah dan otonomi khusus negara kesatuan republik Indonesia.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

Skor Perolehan

Nilai = $\frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 100$

12

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran

	Masukan	Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran
--	---------	--

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 4.1

LEMBAR DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan *kelompok ahli* kemudian laporkanlah hasil diskusi *kelompok ahli* kepada *kelompok asal*. Susunlah laporan hasil diskusi dari masing-masing ahli pada *kelompok asal* kemudian sajikanlah ke dalam *Mind Mapping* !

- **Kelompok Asal**

Kelompok Asal I : Otonomi Daerah

Kelompok Asal II : Otonomi Khusus DKI

Kelompok Asal III : Otonomi Khusus DIY

Kelompok Asal IV : Otonomi Khusus Papua

Kelompok Asal V : Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam

- **Kelompok Ahli**

Terdiri dari kelompok asal ,untuk mendiskusikan (5W+1H) otonomi daerah/otonomi khusus.

Kelompok Ahli I :

What ?

Kelompok Ahli II :

Why ?

Kelompok Ahli III :

When ?

Kelompok Ahli IV :

Where ?

Kelompok Ahli V :

Who ?

Kelompok Ahli VI :

How ?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Kedudukan Serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1	Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		3.4.2	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.
		3.4.3	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah
		3.4.4	Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1	Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		4.4.2	Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat
- b. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah
- c. Mengkomunikasikan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta

- a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Konsep

- a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah

3. Prinsip

- a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

- c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
- a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
 - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
 - c. Prosedur pemilihan kepala daerah

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah” adalah :

- 1. Metode : *Scientific Learning*
- 2. Strategi : Ceramah, Tanya-Jawab *Klasikal*, permainan “*lempar dadu educative*”

F. Media dan bahan

- 1. Media
 - a. *Power point* tentang kedudukan serta peran pemerintahan pusat dan daerah
 - b. Permainan “*lempar dadu educative*”
- 2. Alat/Bahan
 - a. LCD, *Proyektor*
 - b. Laptop
 - c. *White board*
 - d. Spidol
 - e. Kertas karton
 - f. Bolpoin

G. Sumber belajar

- a. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- b. Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: pusat kurikulum

dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.

f. Taniredja, Tukiran. 2012. Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bandung : Alfabeta.

g. Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X*

Semester 1. Jawa Tengah : Viva Pakarindo.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “desentralisasi/otonomi daerah” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah”.4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan	10’

<p>daerah”.</p> <p>5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan dalam bab “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah”.</p>	
<p>b. Kegiatan inti</p> <p>1. Mengamati</p> <p>a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep mengenai Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah pada <i>Wall Screen</i>.</p> <p>b. Guru menjelaskan kedudukan dan peran yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah beserta tugas dan wewenangnya.</p> <p>c. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati skema kedudukan serta peran yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>2. Menanya</p> <p>a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : mengapa kita sebagai warga negara perlu mengetahui Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah ?</p> <p>b. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab <i>klasikal</i> berkenaan dengan Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>a. Peserta didik diberi waktu oleh guru untuk memahami buku teks siswa.</p> <p>b. Peserta didik mengumpulkan informasi melalui internet atau sumber lain secara berkelompok.</p> <p>4. Mengasosiasi</p> <p>c. Guru mengamati peserta didik dalam kegiatan belajar mandiri untuk memahami buku siswa</p> <p>d. Guru memberikan permainan kepada siswa “<i>lempar dadu educative</i>” dan memberikan arahan aturan main terkait permainan tersebut.</p> <p>e. Guru membimbing peserta didik dalam permainan, peserta didik yang mendapatkan dadu wajib menjawab pertanyaan yang</p>	<p>70’</p>

<p>diberikan oleh guru/teman sebaya</p> <p>5. Mengkomunikasikan</p> <p>a. Guru membimbing setiap perwakilan siswa yang mendapatkan tantangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun teman sebaya.</p> <p>b. Guru bersama peserta didik memberikan <i>apresiasi</i> dengan bertepuk tangan, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik, serta penguatan hasil tanya jawab siswa melalui media bermain.</p>	
<p>c. Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru. 2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. 3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami. 4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara. 5. Guru memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu KD 4.3. tentang “Hubungan Pemerintah pusat dan daerah”. 6. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. 	10’

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran	Penilaian untuk dan pencapaian

				berlangsung	pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)
--	--	--	--	-------------	---

b. Penilaian Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan


No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis) dengan soal pilihan ganda	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran selesai	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)

d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

I. MATERI PEMBELAJARAN

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.

a. Fungsi Layanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Sementara itu ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

1) Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2) Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4) Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6) Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. **Fungsi Pemberdayaan**

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

- e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: X / Gasal
Materi Pokok	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu	: 2 X 45 Menit (1 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)		Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	
1.4.	Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		1.4.2	Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4.	Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.4.1	Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2.4.2	Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4.	Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.4.1	Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
		3.4.2	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat
		3.4.3	Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah

		3.4.4	Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4.	Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1	Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
		4.4.2	Mengkomunikasikan hasil telaah mengenai otonomi daerah dan otonomi khusus yang diberikan oleh suatu daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial

Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu :

- a. Melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Menerima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempelajari materi tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Menampilkan sikap kerjasama terkait materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Menampilkan sikap tanggung jawab terkait Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat :

- a. Mengidentifikasi hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah
- b. Mengidentifikasi hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
- c. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. MATERI PEMBELAJARAN : FAKTA, KONSEP, PRINSIP, PROSEDUR

1. Fakta
 - a. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Konsep
 - a. Konsep/pengertian tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Konsep/pengertian tentang Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Konsep/pengertian tentang Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Prinsip
 - a. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kedudukan serta Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Struktural dan Fungsional antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Prosedur
 - a. Prosedur atau tata cara dalam proses Desentralisasi atau Otonomi Daerah
 - b. Prosedur atau tata cara dalam kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah
 - c. Prosedur atau tata cara dalam pemilihan kepala daerah

E. METODE PEMBELAJARAN

Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam materi pembelajaran “Hubungan Struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah” adalah :

1. Pendekatan : *Scientific Learning*

2. Strategi : Pencarian informasi tentang hubungan Struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan cara menjodohkan lembar informasi yang diberikan oleh guru.
3. Metode : Ceramah, tanya jawab, game tentang kedudukan dan peran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

F. Media dan bahan

1. Media/alat : Power point
2. Bahan : LCD, *Proyektor*, *whiteboard*, Kertas, Bolpoin, spidol

G. Sumber belajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum

dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X*. Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tim Penyusun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Semester 1*. Jawa Ttengah : Viva Pakarindo.

H. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN:

Kegiatan Belajar	Waktu
<p>a. Kegiatan Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar seperti buku paket, alat serta media pembelajaran yang diperlukan, kemudian berdoa bersama, guru menanyakan kehadiran peserta didik dengan presensi.2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik3. Guru bersama peserta didik melakukan <i>apersepsi</i> melalui tanya jawab <i>klasikal</i> mengaitkan kembali materi “Kedudukan serta peran pemerintah pusat dan daerah” dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”.4. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang materi pokok pembelajaran yang akan dipelajari, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yakni “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah”.5. Guru menyampaikan lingkup penilaian dan tehnik penilaian yang akan digunakan.	10’
<p>b. Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengamati<ol style="list-style-type: none">a. Guru menampilkan materi terkait fakta & konsep terkait Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah pada <i>Wall Screen</i>.b. Guru menjelaskan mengenai Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerahc. Guru mengamati keterampilan peserta didik dalam mengamati hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah2. Menanya	70’

<p>a. Guru bertanya kepada peserta didik, seperti : bagaimana jika pemerintah pusat tidak menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah ?</p> <p>b. Peserta didik bersama dengan guru melakukan dialog mendalam secara <i>klasikal</i> untuk mengungkapkan bagaimana tanggapan peserta didik berdasarkan masalah yang disajikan oleh guru.</p> <p>c. Guru bersama dengan peserta didik melakukan tanya jawab <i>klasikal</i> berkenaan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>a. Guru memberikan lembar informasi/kertas untuk dibagikan kepada seluruh peserta didik yang berisi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah baik secara struktural maupun fungsional.</p> <p>b. Peserta didik mencari jodoh (mencocokkan) terkait hubungan pemerintah pusat/daerah dengan teman sebaya, jika peserta didik yang tidak mendapatkan jodohnya atau dalam mencocokkan tidak tepat disuruh maju kedepan untuk mendapatkan <i>punishment</i>.</p> <p>4. Mengasosiasi</p> <p>a. Menugaskan kepada masing-masing peserta didik tentang materi dalam lembar informasi (kertas) yang telah dibagikan dan telah menemukan jodohnya untuk di analisis.</p> <p>b. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas dan memfasilitasi jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan.</p> <p>5. Mengkomunikasikan</p> <p>a. Menugaskan kepada peserta didik secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil analisisnya.</p>	
<p>c. Penutup</p> <p>1. Peserta didik secara aktif menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya-jawab <i>klasikal</i> dengan dibimbing oleh guru.</p> <p>2. Peserta didik membuat <i>refleksi</i> atas manfaat proses pembelajaran</p>	10'

<p>yang telah dilakukan berkaitan dengan Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami.</p> <p>4. Guru melakukan <i>evaluasi</i> dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait materi yang telah disampaikan yaitu tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>5. Mengajak peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.</p>	
---	--

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Teknik penilaian

a. Penilaian Sikap Spiritual

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Observasi	Jurnal	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk dan pencapaian pembelajaran (<i>assessment for and of learning</i>)

b. Penilaian Sikap Sosial

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penilaian diri	Lembar penilaian antar teman	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran usai	Penilaian sebagai pembelajaran (<i>assessment as learning</i>)

c. Penilaian Pengetahuan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tertulis	Pertanyaan (tertulis)	Lihat Lampiran ...	Setelah pembelajaran	Penilaian untuk pembelajaran

		dengan soal pilihan ganda		selesai	(<i>assessment for learning</i>)
2	Penugasan	Tugas berbentk diskusi kelompok	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk pembelajaran (<i>assessment for learning</i>)


d. Penilaian Keterampilan

No.	Teknik	Bentuk Instrumen	Contoh Butir Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Praktik	Tugas (keterampilan)	Lihat Lampiran ...	Saat pembelajaran berlangsung	Penilaian untuk, sebagai, dan/atau pencapaian pembelajaran (<i>assessment for, as, and of learning</i>)

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

LAMPIRAN

Sekolah	: SMA N 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas / Semester	: X / 1 (Satu)
Materi Pokok	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

I. MATERI PEMBELAJARAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Cara pertama*, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. *Cara kedua*, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

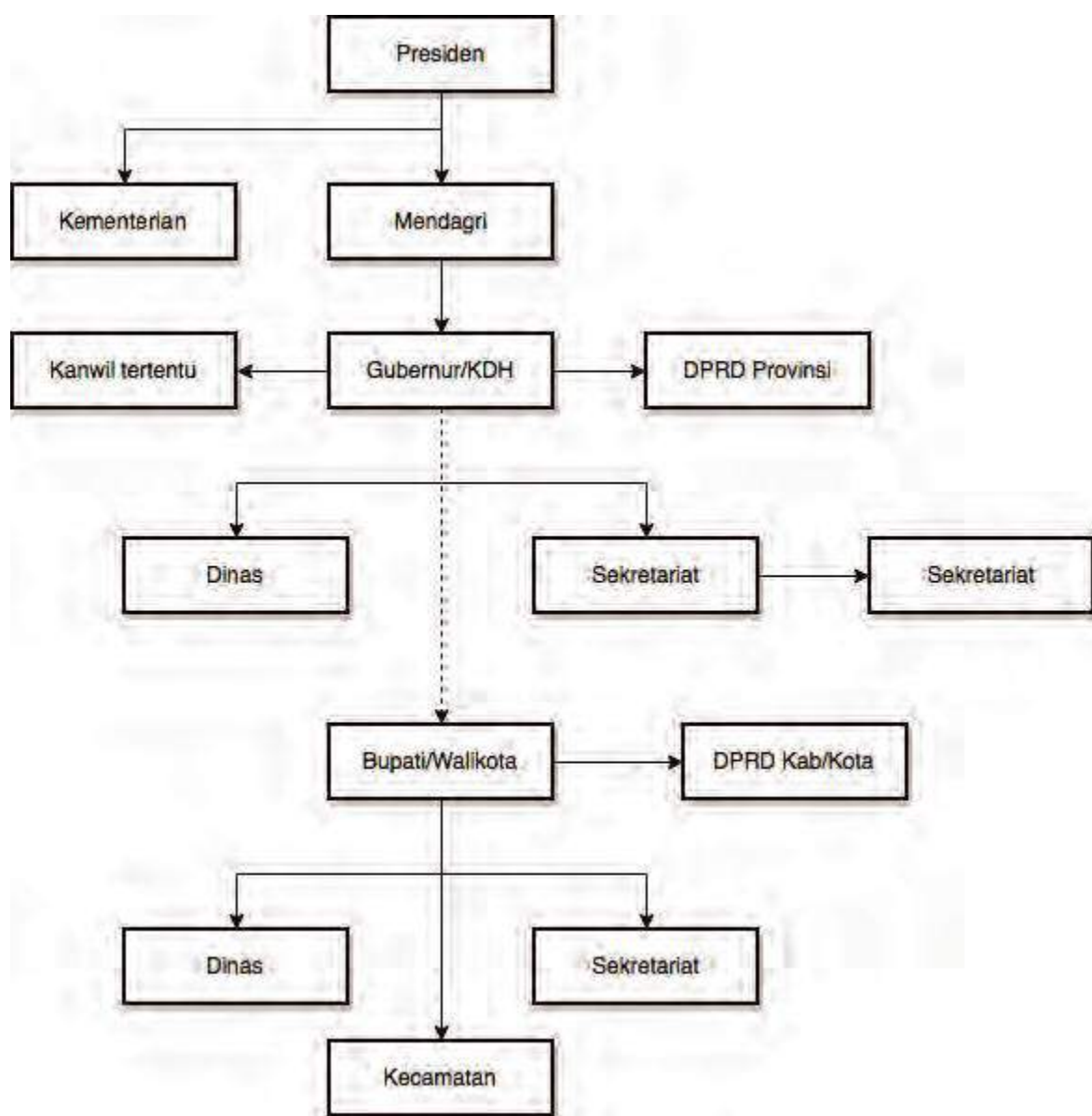
- a) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- b) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- c) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah tergambar pada bagan berikut.



II. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai yaitu kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual dan Sosial

Kelas :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke- :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian					
		Bersyukur	Berdoa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Peduli

2. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil diskusi terkait otonomi daerah dan otonomi khusus negara kesatuan republik Indonesia.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Argumentasi				Memberi Masukan/Saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan: diisi dengan tanda cek (V)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Rumus :

Skor Perolehan

Nilai = ————— X 100

12

***Pedoman Penskoran (rubrik)**

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2	Kemampuan Menjawab Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/saran Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan/ saran

3. Penilaian Pengetahuan

Penilaian Pengetahuan : Pertanyaan lisan sesuai IPK dan pertanyaan yang berkembang dalam pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 4.3.

KISI – KISI

Nama Sekolah : SMA N 11 Yogyakarta

Mata Pelajaran : PPKn

Semester : 1 (Satu)

Jumlah Soal : 15 Soal

Kurikulum : K13

Alokasi Waktu : 2JP (90 Menit)

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator Soal	Bentuk Tes	Tingkat Kognitif	No Soal
3.3. Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia. 2. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945. 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).	3.3.1. Peserta didik mampu menganalisis suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.	Pilihan ganda, uraian	C3	1,1 Essay
		3.3.2. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.	Uraian	C1	2 Essay

	4. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.	3.3.3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD 1945.	Pilihan ganda, uraian	C3	2, Essay 3
		3.3.4. Peserta didik mampu menjelaskan tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945	Pilihan ganda, uraian	C1	3, 4, 5, Essay 4
		3.3.5. Peserta didik mampu menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik.	Pilihan ganda	C3	7
		3.3.6. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur pokok beserta karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik.	Pilihan ganda	C1	8
		3.3.7. Siswa mampu menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI.	Pilihan ganda, uraian	C1	9, 5 Essay

		3.3.8. Siswa mampu menjelaskan piramida partisipasi politik menurut David F.Roth dan Frank L.Wilson	Pilihan ganda	C1	10
--	--	---	---------------	----	----

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Yogyakarta, 03 November 2017

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

ULANGAN HARIAN PPKn

MATERI KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

1. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Berikut yang termasuk kedalam suprastruktur politik adalah :
 - a. legislatif, eksekutif, yudikatif
 - b. legislatif, eksekutif, federatif
 - c. eksekutif, yudikatif, federatif
 - d. Partai politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan
 - e. Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Alat komunikasi politik

2. Dalam sistem poliitik Indonesia pelaksana fungsi kebijakan legislatif adalah
 - a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
 - b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
 - c. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD
 - d. Presiden bersama DPR
 - e. Presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri

3. Hak yang dimiliki oleh DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak
 - a. Interpelasi
 - b. Imunitas
 - c. Bugjed
 - d. Angket
 - e. Inisiatif

4. Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. presiden
 - d. DPA
 - e. MA

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, menurut UUD 1945 setelah perubahan yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Badan Pengawas Keuangan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. Dewan Perwakilan Daerah
 - e. Dewan pertimbangan agung

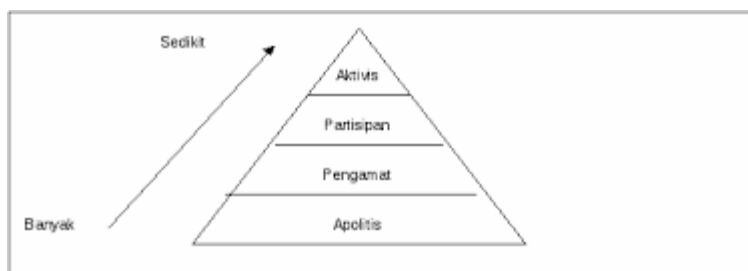
6. Berikut yang merupakan unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah
 - a. Kelompok kepentingan, pemerintah pada suatu periode tertentu , rakyat
 - b. Pemerintah pada suatu periode tertentu, swasta/wirusaha yang bergerak dalam pelayanan publik, warga masyarakat
 - c. Warga masyarakat, pengusaha asing, kelompok kepentingan
 - d. Kelompok kepentingan, warga masyarakat, kelompok penekan
 - e. Pemerintah pada suatu periode tertentu, warga masyarakat, kelompok kepentingan.

7. Yang bukan merupakan ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laode Ida adalah
 - a. Tidak adanya saling ketergantungan yang dinamis antara ketiga unsur
 - b. Saling ketergantungan yang dinamis antara ketiga unsur
 - c. Adanya komunikasi antara ketiga unsur untuk melakukan sinergi dalam menghasilkan *output* yang berkualitas
 - d. Adanya keseimbangan antara ketiga unsur dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berlanjut
 - e. adanya independensi antara ketiga unsur

8. Pentingnya sikap transparansi pada pemerintahan adalah
 - a. Memberikan informasi alur keuangan pada rakyat
 - b. Mengakui krisis moneter yang berkepanjangan
 - c. Mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat
 - d. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, adil, dan jujur
 - e. Agar pejabat pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya

9. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya memengaruhi kebijakan pemerintah disebut
- Partisipasi politik
 - Sosialisasi politik
 - Budaya politik
 - Sistem politik
 - Struktur politik

10. Perhatikan gambar berikut !



Berdasarkan gambar diatas, yang termasuk kedalam kelompok pengamat adalah

- Pejabat partai, pemimpin partai, kelompok kepentingan
- Pemimpin partai, petugas kampanye, menghadiri rapat umum
- Anggota aktif dari partai, petugas kampanye, memberikan suara dalam pemilu
- Memberikan suara dalam pemilu, anggota partai, orang yang golput
- Menghadiri rapat partai, memberikan suara dalam partai, membicarakan masalah politik

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

- Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, dan media komunikasi politik !
- Jelaskan secara singkat hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia !
- Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 terbagi dalam lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga daerah, sebutkan lembaga negara yang termasuk lembaga tinggi negara !

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 (1)*** !
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikan contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku !

Kunci Jawaban

A. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No	Kunci	Skor
1	A	1
2	C	1
3	D	1
4	C	1
5	E	1
6	B	1
7	A	1
8	D	1
9	A	1
10	E	1
Jumlah		10

B. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	<p>Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik dan media komunikasi politik :</p> <p>a. Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.</p> <p>b. Kelompok Kepentingan (<i>interest group</i>), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri).</p> <p>c. Kelompok Penekan (<i>pressure group</i>), yaitu kelompok yang</p>	6

	<p>bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka.</p> <p>d. Tokoh Politik (<i>Political Figure</i>), tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga setiap pendapat/pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang.</p> <p>e. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.</p>	
2	<p>Hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia :</p> <p>Di negara dengan sistem politik demokrasi, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras dan seimbang, dalam menentukan kebijakan umum. Infrastruktur berfungsi sebagai sarana masukan (input) yang berwujud pernyataan, keinginan-keinginan dan tuntutan masyarakat, sedangkan suprastruktur politik yaitu pemerintah dalam arti luas berfungsi sebagai output dalam hal menentukan public policy yang berwujud keputusan-keputusan politik sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.</p>	6
3	<p>Lembaga negara yang termasuk lembaga tinggi negara :</p> <p>MPR, DPR, DPRD, Presiden, BPK, MA, MK</p>	6
4	<p>Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 (1)*** :</p> <p>Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p>	6
5	<p>Contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku :</p> <p>a. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.</p> <p>b. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS</p>	6

	atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. c. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.	
Jumlah		30
Nilai	$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor A+B}}{4} \times 10$	

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

KETERLAKSANAAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN ULANGAN HARIAN KD 3

Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : X IPA 2 & X IPA 3
Semester : Gasal
Tahun Ajaran : 2017/2018

A. KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) Untuk kompetensi inti sikap spiritual

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) Untuk kompetensi inti sikap sosial

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotongroyong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) Untuk kompetensi inti pengetahuan

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin Tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) Untuk kompetensi inti keterampilan

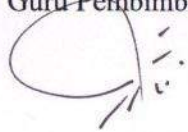
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Materi	Nama	Bentuk	Waktu	Nilai		Keterangan
						Sebelum	Sesudah	
1	3.3.Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menuurt Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia 2. Lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Partisipasi warga negara dalam sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ardi Kurnia S 2. Alfonsus Bagaskara W 	Penugasan Ulangan Harian (Mengerjakan Modul Pembelajaran siswa hal.59 poin Remedial)	Rabu, 8 Oktober 2017	67,5	70	KKM 70

		politik RI						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui
Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

ANALISIS HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran : PPKn
 Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
 Kelas : X IPA 2
 Semester : 1 (Satu)

Tahun Ajaran : 2017/2018
 Hari/Tanggal : 25 Oktober 2017
 Jumlah Soal : 15
 Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Essay
 kkm 70

No	Nama Siswa	No Soal	Skor yang diperoleh															Jumlah Skor	Nilai	Ket	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5				
1	AGASYITA KANDHI ASMARA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	4	6	5	6	36	90	PENGAYAAN
2	ALEXANDRA CALLISTA BONGATA BONG		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
3	ALFONSUS BAGASKARA WIDIANTONO		1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	5	1	5	0	6	25	62,5	REMIDI	
4	ARYA RIZKY PRATAMA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	6	3	6	36	90	PENGAYAAN	
5	ASHLEY SALSABIELA ARISTAWATI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	1	6	34	85	PENGAYAAN	
6	AUFANISSA LUZIDA AZMI AURELIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	6	2	6	33	82,5	PENGAYAAN	
7	CAECILIA DEWANI PUSPITANINGRUM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	5	5	6	37	92,5	PENGAYAAN	
8	CAHAYA PUSPA PUTRI WIBAWA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	5	6	1	6	33	82,5	PENGAYAAN	
9	DEATHA KURNIA PUTRI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN	
10	GEORGIANA KINAYA YOVINTA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	6	32	80	PENGAYAAN		
11	HARISUDDIN HAWALI		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	6	6	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN	
12	HARYO HARI WIBOWO		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	6	5	6	5	6	37	92,5	PENGAYAAN	
13	HESTININGTYAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN	
14	IZDIHAR ASHARI ANDANA		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	6	6	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN	
15	JULIANITA MAWARNING TYAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	3	6	34	85	PENGAYAAN	
16	KHOERUNNISA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	4	6	2	6	33	82,5	PENGAYAAN	
17	MARKUS SAKA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	5	5	6	37	92,5	PENGAYAAN	
18	MUHAMMAD FAHRI HUSSEIN		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	4	5	6	4	6	34	85	PENGAYAAN	

19	MUHAMMAD FAZA ABEL JONGGARA M		1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	6	5	6	6	6	37	92,5	PENGAYAAN
20	MUHAMMAD REYHAN HEZA PUTRA		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	5	6	1	6	33	82,5	PENGAYAAN
21	MUHAMMAD SAYYIDIN HAWIBOWO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	5	6	37	92,5	PENGAYAAN
22	MUHAMMAD TAUFIK IHSANNURI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN
23	NUR ALYA PURWANINGTYAS		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	5	6	6	2	6	34	85	PENGAYAAN
24	PRADITYA PANGESTU HARTOYO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	5	2	6	31	77,5	PENGAYAAN
25	SEFANIA DIAN NATASYA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	6	2	6	33	82,5	PENGAYAAN
26	SEKAR LITYA MUSTIKA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	2	5	4	6	32	80	PENGAYAAN
27	THERESIA ANINDYA GIOVANNI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	6	6	38	95	PENGAYAAN
28	VINCENTIA SEKAR PRAKASITA		1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	5	4	6	6	6	35	87,5	PENGAYAAN
29	YOSEPH BERGAS PUDYASTA		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	6	4	6	5	6	36	90	PENGAYAAN
30	ZIDAN PAMUNGKAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	6	6	6	6	39	97,5	PENGAYAAN

Ketuntasan Belajar

Jumlah Siswa yang mengikuti Tes : 30

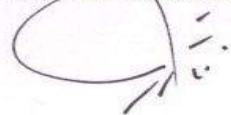
Jumlah siswa yang tuntas : 29

Jumlah siswa yang tidak tuntas : 1

Daya Serap : $29 : 30 \times 100\% = 96,66\%$

Mengetahui

Guru Pembimbing




Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Yogyakarta, 03 November 2017

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

ANALISIS HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Kelas : X IPA 2

Semester : 1 (Satu)

Tahun Ajaran : 2017/2018

Hari/Tanggal : 25 Oktober
2017

Jumlah Soal : 15

Bentuk Soal : Pilihan
Ganda dan Essay
KKM 70

No	Nama Siswa	No Soal	Skor yang diperoleh															Jumlah Skor	Nilai	Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5			
1	ADEL WIN KEVIN SETIAWAN		1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	6	6	5	2	5	31	77,5	PENGAYAAN
2	AISHA SYIFA AYUDIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN
3	AKMAL SOFUAN HIDAYAT		1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	6	5	4	1	6	28	70	PENGAYAAN
4	ALMIRA ARDEKIA FASYADHIRA		1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	5	5	1	5	31	77,5	PENGAYAAN
5	ARDI KURNIA SETIAWAN		1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	4	3	1	6	27	67,5	REMIDI	
6	ARIFA SAUSAN ADITYASARI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	40	100	PENGAYAAN	
7	ARRIFAH AINUL MARDIYAH		1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	2	6	34	85	PENGAYAAN	

8	AZARINE MAHYA VEDHA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	6	1	6	32	80	PENGAYAAN
9	BERNADETHA ERDHA TREVIANA	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	3	6	6	2	6	31	77,5	PENGAYAAN		
10	DELLA ROSA SUKMA AYU KARNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	5	2	6	35	87,5	PENGAYAAN		
11	DWINITA YULIANTIKA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	5	5	5	1	5	29	72,5	PENGAYAAN		
12	ELVIANO VIERLA RIZKI FIRMANSAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	1	6	33	82,5	PENGAYAAN		
13	ENGGAR GALIH YUWANA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	5	6	2	6	34	85	PENGAYAAN		
14	GREGORIUS ADI PRADANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN		
15	HANNA RASTYA MULIAWATI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	4	6	5	35	87,5	PENGAYAAN		
16	IVA NIRWANA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	5	5	6	2	6	32	80	PENGAYAAN		
17	JUANATA SATRIA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	5	4	5	2	6	31	77,5	PENGAYAAN		
18	MIFTAH FAJRI MADANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN		
19	MIKAEL RIZKI PANDU EKANTO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	6	6	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN		
20	MUHAMMAD GARINDIRA RAHJAYA	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	5	5	6	1	6	31	77,5	PENGAYAAN		
21	MUHAMMAD IQBAL FAROZIN	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	5	5	5	1	6	30	75	PENGAYAAN		
22	NAJWA DHEA DENINTA	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	6	6	1	6	31	77,5	PENGAYAAN		
23	PATRICIA CAMILA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	2	6	33	82,5	PENGAYAAN		
24	RADEN RORO ELENORA ARDHIYA STELLA W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	2	6	36	90	PENGAYAAN		
25	STEFANIE VITASIA FERIADHISTY	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	2	6	35	87,5	PENGAYAAN		

26	STEFIAN AQUINAS TEGU PRATAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	6	1	6	32	80	PENGAYAAN
27	STEPHANIE VERINA KUSUMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	6	1	6	33	82,5	PENGAYAAN
28	TAUFIK KURNIAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	2	4	34	85	PENGAYAAN
29	YOHANA IVEN AIKO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	2	6	33	82,5	PENGAYAAN
30	YOHANES NUGROHO WALUYOJATI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	2	6	36	90	PENGAYAAN

Ketuntasan Belajar

Jumlah Siswa yang mengikuti Tes : 30

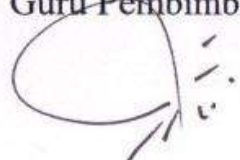
Jumlah siswa yang tuntas : 29

Jumlah siswa yang tidak tuntas : 1

Daya Serap : $29 : 30 \times 100\% = 96,66\%$

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Yogyakarta, 03 November 2017

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

DAFTAR NILAI PENUGASAN DAN KELOMPOK KELAS X IPA 2
MATA PELAJARAN PPKn

NO	NAMA	Tugas Kelompok			Tugas Individu	UH	Remidi
		1	2	3	1		
1	ADELWIN KEVIN SETIAWAN	78	78	94	98	77,5	
2	AISHA SYIFA AYUDIA	80	80	98	81	100	
3	AKMAL SOFUAN HIDAYAT	80	85	94	86	70	
4	ALMIRA ARDEKIA FASYADHIRA	80	87	98	90	77,5	
5	ARDI KURNIA SETIAWAN	85	78	92	80	67,5	70
6	ARIFA SAUSAN ADITYASARI	78	87	92	82	100	
7	ARRIFAH AINUL MARDIYAH	78	78	94	84	85	
8	AZARINE MAHYAVEDHA	80	80	94	87	80	
9	BERNADETHA ERDHA TREVIANA	80	90	94	92	77,5	
10	DELLA ROSA SUKMA AYU KARNO	80	85	94	92	87,5	
11	DWINITA YULIANTIKA	85	90	96	87	72,5	
12	ELVIANO VIERLA RIZKI FIRMANSAH	85	85	94	80	82,5	
13	ENGGAR GALIH YUWANA	80	80	94	80	85	
14	GREGORIUS ADI PRADANA	78	78	96	90	87,5	
15	HANNA RASTYA MULIAWATI	85	90	94	80	87,5	
16	IVA NIRWANA	85	80	96	78	80	
17	JUANATA SATRIA	80	87	92	17	77,5	
18	MIFTAH FAJRI MADANI	78	85	94	89	87,5	
19	MIKAEL RIZKI PANDU EKANTO	80	78	98	90	87,5	
20	MUHAMMAD GARINDIRA RAHJAYA	85	78	94	79	77,5	
21	MUHAMMAD IQBAL FAROZIN	80	78	96	79	75	
22	NAJWA DHEA DENINTA	85	87	96	82	77,5	
23	PATRICIA CAMILA	85	90	98	70	82,5	
24	RADEN RORO ELENORA ARDHIYA S.W	80	80	94	82	90	
25	STEFANIE VITASYA FERIADHISTY	85	90	92	98	87,5	
26	STEFIAN AQUINAS TEGU PRATAMA	85	85	98	84	80	
27	STEPHANIE VERINA KUSUMA	78	85	92	85	82,5	
28	TAUFIK KURNIAWAN	80	85	92	70	85	
29	YOHANA IVEN AIKO	85	80	98	90	82,5	
30	YOHANES NUGROHO WALUYOJATI	85	85	96	90	90	

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

DAFTAR NILAI PENUGASAN DAN KELOMPOK KELAS X IPA 3
MATA PELAJARAN PPKn

NO	NAMA	Tugas Kelompok			Tugas Individu	UH	Remidi
		1	2	3	1		
1	AGASYITA KANDHI ASMARA	76	87	94	82	90	
2	ALEXANDRA CALLISTA BONGATA BONG	70	87	96	90	100	
3	ALFONSUS BAGASKARA WIDIANTONO	78	78	90	79	62,5	70
4	ARYA RIZKY PRATAMA	78	78	84	85	90	
5	ASHLEY SALSABIELA ARISTAWATI	80	85	90	89	85	
6	AUFANISSA LUZIDA AZMI AURELIA	80	90	96	96	82,5	
7	CAECILIA DEWANI PUSPITANINGRUM	78	90	94	80	92,5	
8	CAHAYA PUSPA PUTRI WIBAWA	85	78	96	95	82,5	
9	DEATHA KURNIA PUTRI	70	85	85	89	87,5	
10	GEORGIANA KINAYA YOVINTA	78	70	94	80	80	
11	HARISUDDIN HAWALI	80	78	85	80	87,5	
12	HARYO HARI WIBOWO	85	87	84	83	92,5	
13	HESTININGTYAS	76	85	94	85	97,5	
14	IZDIHAR ASHARI ANDANA	85	85	85	87	87,5	
15	JULIANITA MAWARNING TYAS	78	85	96	87	85	
16	KHOERUNNISA	85	78	96	92	82,5	
17	MARKUS SAKA	85	85	90	86	92,5	
18	MUHAMMAD FAHRI HUSSEIN	78	78	84	88	85	
19	MUHAMMAD FAZA ABEL JONGGARA M	80	78	90	85	92,5	
20	MUHAMMAD REYHAN HEZA PUTRA	80	90	85	70	82,5	
21	MUHAMMAD SAYYIDIN HAWIBOWO	76	85	84	85	92,5	
22	MUHAMMAD TAUFIK IHSANNURI	76	87	84	79	97,5	
23	NUR ALYA PURWANINGTYAS	85	78	96	92	85	
24	PRADITYA PANGESTU HARTOYO	70	78	90	84	77,5	
25	SEFANIA DIAN NATASYA	76	78	85	90	82,5	
26	SEKAR LITYA MUSTIKA	85	78	90	90	80	
27	THERESIA ANINDYA GIOVANNI	80	78	94	87	95	
28	VINCENTIA SEKAR PRAKASITA	85	85	94	80	87,5	
29	YOSEPH BERGAS PUDYASTA	85	78	85	79	90	
30	ZIDAN PAMUNGKAS	70	78	84	84	97,5	

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

DAFTAR HADIR ULANGAN HARIAN BAB 3			
MATA PELAJARAN PPKn			
KELAS X IPA 2			
No	NAMA	TANDA TANGAN	
1	ADEL WIN KEVIN SETIAWAN	1	
2	AISHA SYIFA AYUDIA		2
3	AKMAL SOFUAN HIDAYAT	3	
4	ALMIRA ARDEKIA FASYADHIRA		4
5	ARDI KURNIA SETIAWAN	5	
6	ARIFA SAUSAN ADITYASARI		6
7	ARRIFAH AINUL MARDIYAH	7	
8	AZARINE MAHYA VEDHA		8
9	BERNADETHA ERDHA TREVIANA	9	
10	DELLA ROSA SUKMA AYU KARNO		10
11	DWINITA YULIANTIKA	11	
12	ELVIANO VIERLA RIZKI FIRMANSAH		12
13	ENGGAR GALIH YUWANA	13	
14	GREGORIUS ADI PRADANA		14
15	HANNA RASTYA MULIAWATI	15	
16	IVA NIRWANA		16
17	JUANATA SATRIA	17	
18	MIFTAH FAJRI MADANI		18
19	MIKAEL RIZKI PANDU EKANTO	19	
20	MUHAMMAD GARINDIRA RAHJAYA		20
21	MUHAMMAD IQBAL FAROZIN	21	
22	NAJWA DHEA DENINTA		22
23	PATRICIA CAMILA	23	
24	RADEN RORO ELENORA ARDHIYA STELLA W		24
25	STEFANIE VITASYA FERIADHISTY	25	
26	STEFIAN AQUINAS TEGU PRATAMA		26
27	STEPHANIE VERINA KUSUMA	27	
28	TAUFIK KURNIAWAN		28
29	YOHANA IVEN AIKO	29	
30	YOHANES NUGROHO WALUYOJATI		30

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing

Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT

Nanik Widiana Sari

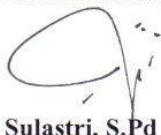
NIM.14401241038

DAFTAR HADIR ULANGAN HARIAN BAB 3			
MATA PELAJARAN PPKn			
KELAS X IPA 3			
No	NAMA	TANDA TANGAN	
1	AGASYITA KANDHI ASMARA	1	
2	ALEXANDRA CALLISTA BONGATA BONG		2
3	ALFONSUS BAGASKARA WIDIANTONO	3	
4	ARYA RIZKY PRATAMA		4
5	ASHLEY SALSABIELA ARISTAWATI	5	
6	AUFANISSA LUZIDA AZMI AURELIA		6
7	CAECILIA DEWANI PUSPITANINGRUM	7	
8	CAHAYA PUSPA PUTRI WIBAWA		8
9	DEATHA KURNIA PUTRI	9	
10	GEORGIANA KINAYA YOVINTA		10
11	HARISUDDIN HAWALI	11	
12	HARYO HARI WIBOWO		12
13	HESTININGTYAS	13	
14	IZDIHAR ASHARI ANDANA		14
15	JULIANITA MAWARNING TYAS	15	
16	KHOERUNNISA		16
17	MARKUS SAKA	17	
18	MUHAMMAD FAHRI HUSSEIN		18
19	MUHAMMAD FAZA ABEL JONGGARA M	19	
20	MUHAMMAD REYHAN HEZA PUTRA		20
21	MUHAMMAD SAYYIDIN HAWIBOWO	21	
22	MUHAMMAD TAUFIK IHSANNURI		22
23	NUR ALYA PURWANINGTYAS	23	
24	PRADITYA PANGESTU HARTOYO		24
25	SEFANIA DIAN NATASYA	25	
26	SEKAR LITYA MUSTIKA		26
27	THERESIA ANINDYA GIOVANNI	27	
28	VINCENTIA SEKAR PRAKASITA		28
29	YOSEPH BERGAS PUDYASTA	29	
30	ZIDAN PAMUNGKAS		30

Yogyakarta, 03 November 2017

Mengetahui

Guru Pembimbing



Sulastri, S.Pd

NIP.19720926 200604 2 006

Mahasiswa PLT



Nanik Widiana Sari

NIM.14401241038

**FOTO KEGIATAN
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT/MAGANG III)
SMAN 11 YOGYAKARTA**

1. Kegiatan Pembelajaran



2. Senyum, Salam, Sapa (3 S)



3. Piket Harian KBM



4. Upacara



5. Afeksi Jum'at



6. Piket Perpustakaan



7. Sabtu Bersih



8. Periapan Ulangan Tengah Semester



9. Penarikan PLT



